

MEDIA KALTIMTARA

RABU,
18 OKTOBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA

GUBERNUR KALTARA, PERCAYA DIRI HADAPI KASASI

BACA HALAMAN 2



PASAR MURAH DI MASJID AL MAARIF DISERBU WARGA

BACA HALAMAN 16



Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, bersedia adu argumentasi jika ada kasasi selanjutnya, atas terkabulkan permohonan oleh PT TUN Banjarmasin.

Gubernur Kaltara, Percaya Diri Hadapi Kasasi

TANJUNG SELOR - Permohonan banding yang dilayangkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin, akhirnya dikabulkan.

Permohonan banding yang dilakukan oleh orang nomor satu di Kaltara ini, terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PT TUN Samarinda, Kaltim. Atas gugatan oleh Dt Iman Suramenggala, atas putusan Gubernur Kaltara nomor: 824/174/2.-BKD tentang, Pemberhentian Dt. Iman Suramenggala dalam jabatan sebagai Kepala DPUPR-Perkim Kaltara.

Berdasarkan amar putusan, oleh PT TUN Banjarmasin, yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2023, mengabulkan permohonan peming.

Juga membatalkan, putusan yang dikeluarkan oleh PT TUN Samarinda, nomor 10/G/2023/PTUN.SMD tertanggal 12 Juli 2023 yang dimohonkan banding.

Kepada wartawan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menjelaskan, dengan dikabulkan permohonan oleh PT TUN Banjarmasin secara otomatis gugatan yang dikeluarkan oleh PTUN Samarinda dibatalkan.

“Dengan dikeluarkan putusan itu, maka putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Samarinda dibatalkan,” jelas Gubernur Kaltara, beberapa waktu lalu.

Gubernur menegaskan, tahapan ini telah melalui proses panjang. Dan, hal penting yang digarisbawahi adalah penegakan hukum yang ditegakkan secara adil. Mendukung mana

yang benar ditegakkan dengan benar. Salah ditetapkan bersalah.

“Kita telah berusaha untuk yang benar, itu adalah benar. Dan yang salah tetap salah,” tuturnya.

Jika kemudian pihak tergugat, kembali melakukan kasasi atau banding, kata Gubernur itu dipersilahkan. Bahwa sesungguhnya mereka juga memiliki hak untuk melakukan itu.

“Silahkan, mereka punya hak itu dan kita tentu akan siap untuk hadapi. Bersiap untuk adu argumentasi jika ada kasasi berikutnya,” jelas Zainal.

“Dan kita memiliki bukti yang cukup, jadi akan lebih siap untuk adu argumentasi ke tingkat pengadilan selanjutnya,” pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

Dukung Pembangunan Rumah Kakao

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mendorong pembangunan rumah kakao di Kampung Labanan Makarti. Tujuan dilakukannya pembangunan tersebut, tidak lain untuk mengolah biji kakao menjadi coklat.

Ia menilai, pembangunan rumah kakao penting dilakukan, mengingat Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah penghasil kakao dengan kualitas terbaik. Bahkan, kakao Berau sudah diekspor hingga keluar negeri. "Kami dukung pembangunan itu.

Apalagi kakao Berau sudah mendunia. Karena itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu pembangunan tersebut," jelasnya.

Diakuinya, pembangunan rumah kakao tersebut dapat menjadi langkah penting agar kakao dapat diolah dalam berbagai jenis olahan. Hal itu juga menjadi langkah penting dalam membuka peluang pasar. Terlebih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para petani kakao.

"Jika pembangunan ini berjalan lancar, kami juga meminta pemer-

intah daerah untuk menyiapkan pasar yang mencukupi. Agar pemasaran kakao ke depan menjadi lebih muda dan bermanfaat," terangnya.

Politikus Golkar ini berharap, pembangunan itu juga dapat berjalan lancar dan bebas dari kendala yang berarti nantinya.

"Pemasaran coklatnya sudah bagus, tinggal tempat produksinya saja belum dibangun. Kalau sudah jadi, tentu masyarakat bisa lebih mudah mengolahnya. Ini juga bisa memberdayakan mereka," tandasnya. (adv/and)

Pelayanan Puskesmas di Wilayah Pedalaman Harus Diperhatikan

TANJUNG REDEB - Kurang maksimalnya pelayanan Puskesmas di wilayah pedalaman disoroti Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Komisi I DPRD Berau pada pelaksanaan rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) beberapa waktu lalu.

"Intinya Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau harus menyeimbangkan antara bangunan Puskesmas dengan pelayanan," ungkap Rudi.

Dikatakannya masih banyak PR yang harus diperhatikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti banguns Puskesmas yang tebilang cukup bagus, namun tidak sesuai dengan tingkat pelayanan kepada pasien.

"Puskesmas kita sudah bagus, ha-



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

nya saja sedikit dikit pasien di rujuk. Artinya, kenapa di rujuk berarti ada masalah," ungkapnya.

Selain masalah pelayanan, kata Rudi, yang jadi perhatian pihaknya, adalah ketersediaan obat di daerah perkebunan yang keral kali didapati sudah habis sebelum waktunya.

"Belum sampai satu semester obat sudah habis. Perusahaan punya klinik tapi tidak ada pelayanan, sakit sedikit kirim ke Puskesmas," jelasnya.

"Memang warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan, tapi pada saat berobat mereka bukan ber-KTP Berau. Akhirnya persediaan yang harusnya untuk warga Berau dihabiskan oleh orang luar," tambahnya.

Kendati demikian, dengan permasalahan yang ada mestinya pihak OPD bisa mengambil langkah antisipasi guna menstabilkan antara ketersediaan obat dan warganya.

"Jangan sampai di bebankan ke Kabupaten Berau, perusahaan punya tanggung jawab. OPD mesti gesit dalam mengantisipasi keluhannya masyarakat. Juga maksimalkan layanan Puskesmas," tandasnya. (adv/and)

Ingatkan Pemerintah, Soal Pentingnya Skala Prioritas dalam Penggunaan APBD 2024

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menekankan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Dia menuturkan, harus ada pemikiran sejak sekarang menyikapi Berau yang kedepannya akan menjadi penyokong Ibu Kota Negara (IKN) dari sektor pariwisata. "Penggunaan anggaran perlu ada fokus menyesuaikan situasi dan kondisi," ujarnya.

Dirinya meminta, dalam hal Penyertaan Modal Daerah (PMD) juga harus dapat segera digunakan atau diserap oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "PMD ini berdasarkan pengajuan dari BUMD. Begitu sudah dapat, seharusnya bisa segera digunakan sesuai perencanaan yang sudah disusun," terangnya.

Menurutnya, pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) termasuk yang berada di sektor informal juga harus mendapatkan perhatian. Begitu juga pelaku UMKM yang ada di destinasi wisata. Secara tidak langsung, jika tidak disusun sekarang, ia khawatir ke-



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

depan tidak ada konsep pasti terkait pariwisata tersebut.

"Pedagog Kaki Lima (PKL) per-

lu mendapatkan perhatian, jangan sekadar ditinggalkan. Sediakan juga tempat berjualan yang baik seperti difasilitasi, begitu juga pelaku UMKM di destinasi wisata. Mereka ini punya kebutuhan menafkahi keluarganya," ungkapnya.

Madri juga menuturkan, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga juga harus menjadi prioritas, termasuk bagi warga di Maratua. "Ada kampung di Maratua yang belum menikmati air bersih. Sedangkan Maratua menjadi destinasi wisata andalan. Ini harus dipikirkan juga ke depannya seperti apa," katanya.

Selain itu, akses internet juga menjadi kendala tersendiri, maka dari itu ia meminta pemkab bisa melobi pihak penyedia telekomunikasi, agar bisa bekerja sama menyediakan jaringan internet. Agar promosi pariwisata Berau bisa dilakukan secara langsung di tempat. "Sekarang kan media sosial semakin maju. Sedangkan di Maratua hanya spot tertentu yang memiliki jaringan. Ini harus dibenahi," tutupnya. (adv/and)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo

Masyarakat Sulit Mendapat Pekerjaan, Dorong Perda Tenaga Kerja Lokal Dibuatkan Perbup

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo mendorong Peraturan Daerah (Perda) Tenaga Kerja Lokal dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau kurang terserap, padahal banyak investasi yang berdiri di Bumi Batiwakkal, baik dari sektor pertambangan, perkebunan dan lainnya.

Faletinus menyebut, persoalan susah masyarakat lokal dalam mencari kerja sudah sejak lama terjadi. Apalagi, setiap tahunnya, masalah peluang kerja dan angkatan pencari kerja terus meningkat dan masih cukup tinggi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ungkapnya, pihak eksekutif maupun legislatif melakukan penekanan melalui Peraturan Daerah (Perda)

Perlindungan Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2008.

"Persentasenya, setiap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Berau wajib mengakomodir tenaga kerja lokal sekitar 80 persen dan dari luar 20 persen," jelasnya.

Hanya saja, persentase setinggi 80 persen ini mestinya dapat mengakomodir seluruh pencari kerja lokal di Kabupaten Berau. Namun, sampai dengan hari ini, masih banyak perusahaan yang belum mematuhi Perda tersebut.

"Mungkin ada sebagian menerapkan dan penerapannya pun belum maksimal," tuturnya.

Dia menegaskan, perlu adanya aturan turunan dari Perda tersebut guna memberikan ketegasan bagi para perusahaan yang berinvestasi

di Kabupaten Berau.

"Memang dalam Perda itu tidak ada sanksi kepada perusahaan kalau dia tidak menerapkan," katanya.

Ditegaskannya, kepala daerah harus bisa menutup kelemahan tersebut. Dengan aturan turunan dari Perda yaitu Perbup agar lebih tegas dan memberikan sanksi kepada perusahaan ketika tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

"Komposisinya kan 80 persen lokal, maka harus konsisten. Kalau dari jumlah perusahaan yang hari ini berinvestasi di Berau dibanding dengan angkatan pencari kerja di kabupaten kita, mestinya hari ini tidak ada anak muda kita, apalagi yang lulusan sarjana itu yang menganggur," tandasnya. (adv/and)



Suasana reses III Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga di Pulau Derawan.

Lagi, Masyarakat Pulau Derawan Sampaikan Keluhan Abrasi

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga menggelar reses tahap III tahun sidang 2023 di Kampung Pulau Derawan, Senin (16/10/2023) malam.

Saga mengungkapkan, pada kesempatan reses III tersebut, beberapa aspirasi masyarakat yang menjadi permasalahan telah ditampung dan selanjutnya akan diperjuangkan.

"Sudah kita tampung aspirasi masyarakat, diantaranya penanganan abrasi pantai dan terkait penggunaan mesin kompresor sebagai alat bantu nelayan menangkap ikan," ungkap Saga.

Terkait persoalan abrasi pantai, dirinya, telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (DPUPR) Berau, tentang bagaimana penanganan abrasi yang kian memburuk.

"Tadi penyampaian terkait abrasi pantai, sudah dibicarakan dengan pihak OPD. Rencananya, saya bersama DPUPR Berau akan menemui Kementerian pada 26 Oktober nanti. Akan kita bahas di sana, supaya penanganannya segera terealisasi," ungkapnya.

Sedangkan, persoalan pelarangan penggunaan kompresor untuk menangkap ikan, ia menegaskan, akan melakukan pengkajian ulang terkait kegunaan alat tersebut.

Sebab, meskipun ada aturan yang mengikat, namun bisa saja dilakukan evaluasi mengenai penggunaan alat

dengan ramah lingkungan. "Untuk sementara saya akan mengkoordinasikan kepada pihak terkait, supaya ada solusi lainnya terkait pelarangan kompresor nantinya," terangnya.

Kendati demikian, dirinya akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat. Hanya saja, untuk realisasinya sendiri masih membutuhkan waktu.

Untuk itu, diharapkan masyarakat bisa lebih bersabar. "Tentu akan saya kawal seluruh aspirasi pada malam ini. Namun, ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui. Saya harap masyarakat bisa memahami hal tersebut," tutupnya. (adv/and)



Pustawakan: Buku yang Rusak, Artinya Berhasil Mentransfer Ilmu kepada Pembaca

SAMARINDA – Kondisi buku yang rusak mungkin sebagian orang akan melihat itu adalah suatu hal kurang nyaman dilihat mata. Tetapi tidak menurut pustakawan – pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertugas melestarikan buku koleksi perpustakaan Kaltim yang berada di Jalan IR H Juanda Samarinda.

Buku yang rusak artinya buku itu telah melaksanakan tugasnya sebagai media transfer ilmu pengetahuan. Dengan kondisi buku yang rusak artinya buku tersebut telah digunakan pembaca atau dibaca sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan oleh pembacanya.

Hal ini disampaikan oleh Pustakawan Ahli Madya Agus Said saat ditemui di sela-sela kesibukannya memperbaiki buku – buku perpustakaan dalam kondisi rusak.

“Reparasi buku merupakan suatu proses yang penting dalam dunia perbukuan, karena memungkinkan buku yang rusak untuk dipulihkan dan digunakan kembali,” ujarnya.

Teknik yang digunakan dalam reparasi buku bervariasi tergantung jenis kerusakan yang terjadi pada buku. “Ada beberapa kategori kerusakan buku, ada yang rusak berat, sedang dan berat,” ungkapnya.

Ada beberapa kerusakan umum yang terjadi pada buku. Misalnya, seperti halaman yang robek atau rusak, sampul buku yang robek, serta halaman yang terlipat atau lepas dari ikatan buku.

Teknik-teknik reparasi buku yang digunakan meliputi perbaikan halaman yang robek atau rusak dengan merekatkannya kembali, menyem-

protkan bahan pengawet pada halaman yang mulai membusuk, dan merekatkan kembali sampul buku yang terlepas dari isi buku dengan cara dijahit. “Semua teknik ini dilakukan dengan hati-hati dan ketelitian, sehingga hasil akhirnya akan terlihat seolah-olah buku tidak pernah rusak,” tambahnya.

Pustakawan Ahli Muda Winda Hapiana menyebutkan buku yang dapat diperbaiki tidak hanya buku-buku langka atau antik, namun juga buku-buku sehari-hari seperti novel

atau buku pelajaran.

“Cuma kebetulan ini banyak buku anak-anak yang rusak, buku anak itu seperti buku cerita dan buku belajar anak, dan yang paling sering ini kita perbaiki, karena penulis buku anak itu sangat langka,” ujarnya.

Selanjutnya buku yang telah direparasi, buku tersebut akan diinput kembali ke komputer sebagai buku yang tersedia dan dikembalikan ke bagian pelayanan untuk disusun di rak dan siap digunakan kembali. (adv/and)



Pustakawan Ahli Madya Agus Said saat memperbaiki buku dengan cara dijahit.



Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi.

DPK Samarinda Akan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Naskah Kuno

SAMARINDA – Demi menyelamatkan naskah kuno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi tentang naskah kuno agar naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat bisa dibantu untuk dilestarikan.

“Sementara ini kita akan sosialisasikan soal naskah kuno, karena kita belum mengkaji ini. Jadi langkah awal kita akan sosialisasikan, setelah terkumpul informasinya kita akan kunjungi,” ujarnya.

Diketahui naskah kuno adalah naskah yang bertuliskan isi sejarah, ramuan tradisional, agama dan lainnya yang berumur di atas 50 tahun dan ditulis menggunakan tangan.

Edy Wahyudi mengatakan naskah kuno dengan usianya yang sangat berumur tentunya sangat rentan rusak. Untuk itu, DPK Kota Samarinda mengimbau masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menyerahkannya kepada DPK Kota Samarinda sebagai upaya melestarikan naskah kuno yang dimiliki masyarakat.

“Naskah kuno yang dimiliki masyarakat boleh dititipkan ke DPK Kota Samarinda untuk dilestarikan. Kami akan alih mediakan dan kita akan berikan sertifikat kepemilikan naskahnya. Tapi kalau masyarakat tidak berkenan dititipkan, maka kami mengajarkan cara merawatnya, karena menjaga naskah kuno itu tidak sembarangan,” ungkapnya.

Sementara itu Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah, menyebutkan selama ini belum ada penggalian informasi terhadap naskah kuno yang ada di Samarinda.

Oleh sebab itu, pihak DPK Kota Samarinda akan menggali informasi tentang keberadaan naskah kuno yang dilaporkan masyarakat ke DPK Kota Samarinda.

“Nah kita dapat informasi ada Alquran kuno di Masjid Shiratal Mustaqiem, Samarinda Seberang dan naskah yang ditulis di atas daun lontar dimiliki masyarakat. Kami belum punya tim ahli untuk meneliti berapa umur dari Alquran kuno tersebut. Oleh sebab itu m, kita akan kerjasama dengan Perpustakaan untuk melihat apakah ini benar kategori naskah kuno atau bukan,” ujarnya.

Naskah kuno ini sangat penting diawetkan dan dilestarikan agar bisa dipelajari oleh generasi saat ini dan generasi mendatang. “Tentunya ini akan dijadikan sejarah, agar generasi akan datang bisa tau bahwa sejarah ditempat kita ada naskah kuno nya,” tandasnya. (adv/and)



Widya Astuti dan Andika Arifin, Pelajar SMK Medika Samarinda.

Begini Eksistensi Perpustakaan Menurut Gen Z

SAMARINDA – Di tengah kecanggihan teknologi dan banyaknya koleksi e-book, membaca buku di perpustakaan masih menarik minat Gen Z. Hal ini pun terlihat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mayoritas dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa.

Seperti yang dilakukan Widya Astuti dan Andika Arifin, pelajar SMK Medika Samarinda yang tengah berkunjung ke DPKD Kaltim.

Siang itu, Widya dan Arifin berniat untuk mencari bahan bacaan guna mengerjakan tugas sekolah atau sekadar menyisihkan waktu luang untuk membaca buku.

“Kami ditugaskan untuk mengulas buku novel. Nah, novel yang kami pilih adalah novel bertema horor, karena lebih menarik”, ucap Widya dan dibenarkan Arifin.

Menurut Widya, saat ini banyak bacaan berupa buku digital, tapi muatan ilmu pengetahuannya kurang lengkap. Oleh sebab itu, Widya dan Arifin ini memilih keperpustakaan Kaltim untuk mencari buku fisik karena di dalam buku fisik itu lebih lengkap. “Buku secara fisik itu lebih lengkap dan ada daftar pustaka dan rujukan yang lainnya”, ungkapnya.

Selain itu Widya berharap untuk pelajar-pelajar yang lain untuk meramaikan perpustakaan Kaltim,

untuk meningkatkan budaya literasi agar tidak tergantung dengan media sosial.

“Penting adanya perpustakaan untuk meningkatkan literasi, karena di internet pun informasi belum tersaring banyak berita hoax,” ujar siswi kelas 12 SMK Medika ini

Widya juga mengungkapkan bahwa lebih nyaman membaca buku di perpustakaan. Terlebih lagi fasilitas yang telah disediakan oleh DPKD Kaltim juga lengkap. “Yuk kesini kita manfaatkan fasilitas yang ada disini untuk menambah wawasan kita”, ajaknya. (adv/and)



Rahmawati bersama dua orang penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023.

Masyarakat Pegiat Literasi Asal Kaltim Terima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023

SAMARINDA – Salah satu pegiat di kalangan masyarakat Kalimantan Timur, Rachmawati menjadi salah satu penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023, yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) pada malam Gemilang Perpustakaan 2023 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu, (11/10/2023).

Berita ini diperoleh oleh mediakaltimara.com dari Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda Nurhikmah.

“Perpusnas setiap tahun rutin memberikan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka, untuk pegiat Literasi. Jadi dari kategori masyarakat pegiat literasi Rachmawati lolos menjadi penerima penghargaan tersebut,” ungkap Nurhikmah.

Nurhikmah mengungkapkan bahwa Rachmawati selain Pustakawan di Perpustakaan SMP Fastabiqul

khairat, dia juga memiliki taman bacaan di rumah. Dia menyulap teras rumah menjadi taman bacaan untuk masyarakat sekitar rumahnya.

“Jadi Ibu Rachmawati ini memiliki taman bacaan di teras rumahnya,” katanya.

Di taman bacaan tersebut, Rachmawati aktif melaksanakan kegiatan literasi dari mengajari anak-anak membaca, menulis, membuatik dan menari.

“Jadi Rachmawati ini aktif mengajari anak-anak disana membaca, menulis dan menari. Selain itu dia juga sering mengadakan pelatihan segala macam di taman bacaan dirumahnya itu. Jadi dari pengalamannya itu beliau terpilih sebagai penerima penghargaan tersebut secara nasional,” jelasnya.

Rachmawati menjadi salah satu dari lima orang yang masuk dalam pegiat literasi di lingkungan Masyarakat, atau kategori masyarakat penerima Penghargaan Nugra Jasa

Dharma Pustaloka 2023.

Diketahui sebanyak 22 individu/ lembaga dari tujuh kategori menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Selain kategori Masyarakat Penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023, juga memberikan penghargaan untuk Kategori Pejabat Publik, Kategori Pegiat Literasi, Kategori Media Massa, Kategori Jurnalis, Kategori Pelestari Naskah Kuno, Kategori Lifetime Achievement, Buku (Pustaka) Terbaik, dan kategori lainnya.

Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka merupakan apresiasi tertinggi dari pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) kepada masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga yang berhasil meningkatkan literasi dan kegemaran membaca secara aktif, efektif, dan inovatif melalui pendayagunaan perpustakaan. (adv/and)



Mayat bayi perempuan terlihat mengapung di Sungai Buaya, identitas lengkap belum diketahui.

Miris, Mayat Bayi Ditemukan Mengapung di Sungai Buaya

TANJUNG SELOR - Warga Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan digegerkan dengan penemuan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Lokasi penemuannya di Sungai Buaya, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Selasa (17/10/2023).

Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan mengapung, dengan sehelai kain yang membungkus setengah badan. Selain itu, tubuh bayi malang itu terlihat sudah membengkak dengan posisi telungkup.

Kasi Humas Polresta Bulungan, Bripka Hadi Purnomo saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Bahwa, kepolisian setelah mendapatkan informasi langsung bergegas ke lapangan, kemudian mayat bayi tersebut dievakuasi ke RSUD dr Soemarno Sosroadmodjo Tanjung Selor, dan meminta keterangan dari saksi.

“Benar tadi kita telah menerima laporan terkait adanya penemuan mayat. Lokasinya di sekitar Sungai Selor dekat PDAM Tanjung Rumbia, Kecamatan Tanjung Selor,” ujar Bripka Hadi.

Informasinya, mayat bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, dan identitasnya belum diketahui. “Untuk perkembangan selanjutnya, akan kami sampaikan kembali,” tuturnya.

Kepolisian, mendapatkan laporan dari masyarakat soal penemuan mayat bayi tersebut, sekitar pukul 10.00 wita. Saat ini, telah dikumpulkan keterangan saksi yang pertama kali melihat bayi itu.

Awal mula ditemukan bayi tersebut dari pegawai PUPR Kaltara, yang tengah melakukan pengecekan dan dokumentasi pekerjaan proyek PUPR, berupa pembersihan Sungai Buaya, mulai dari arah Sungai Mer-

anti menuju Sungai Tanjung Rumbia.

Kejadian itu sekitar pukul 10.00 wita, saksi saat itu menggunakan speedboat 40 PK warna Biru, keduanya menelusuri sungai. Dan melihat ada mayat bayi sedang terapung dengan posisi telungkup di Sungai Buaya, melihat kejadian itu, keduanya langsung menghubungi pihak berwajib guna penanganan lebih lanjut.

Diperkirakan, mayat bayi tersebut telah mengapung sudah lebih dari satu hari. Hal itu, dilihat dari kondisi mayat yang terlihat tubuh membengkak.

Berdasarkan video yang beredar, sehelai kain yang membungkus mayat bayi itu, berwarna kuning dan bertuliskan nama kampus ternama, yaitu Universitas Pacitan. **(tin/and)**

Editor: Andhika



Lahan warga yang hendak dibebaskan untuk kawasan industri di Tanah Kuning Jalan ditempat.

Warga Tanah Kuning, Minta Keseriusan Perusahaan Soal Pembebasan Lahan

TANJUNG SELOR – Masyarakat Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan mempertanyakan keseriusan PT Indonesia Strategis Industri (ISI) soal pembebasan lahan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Pasalnya, sejauh ini rencana tersebut tak kunjung berprogres alias mandek. Hal itu disampaikan oleh Ketua RT 01 Tanah Kuning, Suardi.

Dia mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan industri oleh PT ISI belum tuntas hingga hari ini. Hal itu dia sampaikan didukung dengan banyaknya lahan milik warga yang belum dibebaskan oleh pengelola kawasan.

“Iya masih ada sekitar ratusan hektar lahan masyarakat yang belum dibebaskan,” jelas Suardi, saat hubungi oleh wartawan, Rabu (17/10/2023).

Dituturkan, jika lahan warga tidak dibebaskan, maka pembangunan kawasan industri akan sulit terrealisasi. Menurutnya, lahan warga RT 01 kurang lebih 70 persen masuk dalam pengalihan kawasan industri. Persoalan yang terjadi, bahwa warga hendak melepaskan lahan milik mer-

eka, tetapi kendala pada kesepakatan harga.

“Harga jual yang ditawarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pihak perusahaan beralasan, lahan warga itu tidak produktif, sehingga kami menilai perusahaan seakan tidak ada keseriusan untuk pembebasan lahan ini,” terangnya.

Sekarang, kata Suardi warga setempat bertahan. Karena harga yang ditawarkan oleh perusahaan tidak sesuai. Terpisah Kepala Desa (Kades) Tanah Kuning, Budi Rahman Patawari mengomentari persoalan yang sama, bahwa pembebasan lahan yang dijanjikan oleh PT ISI kepada warga, sampai saat ini tidak kunjung realisasi. Awal tahun lalu, sudah ada kesepakatan harga antar perusahaan dengan warga.

“Belum, sampai saat ini tidak kunjung direalisasikan,” tukasnya.

Dia katakan, nilai tawar dari kesepakatan semula malah melorot jauh. Sementara, beberapa lahan milik warga sudah ada yang diukur, termasuk dengan sertifikat lahan tersebut telah diserahkan kepada pihak pengelola dalam hal ini pihak perusahaan.

Sementara itu, Camat Tanjung Palas Timur, Gafar menuturkan hal serupa, bahwa keadaan dilokasi masih nihil alias tidak ada progres yang signifikan. Saat ini, mereka masih sebatas melakukan pembebasan lahan.

“Baru bangun kantor pengelola, sedangkan mengenai pembebasan lahan belum ada sampai dengan saat ini,” tuturnya.

Sebelumnya, untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan PT ISI sempat terbentur persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKK-PR) yang belum terbit. Tetapi saat ini, PKKPR telah diterbitkan, sehingga kesimpulan mengenai perizinan sudah tidak ada masalah.

Mestinya, PT ISI segera membebaskan lahan warga untuk selanjutnya melanjutkan pada kegiatan industri. Oleh karena itu, PT ISI diharapkan berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan kawasan industri. Pihaknya berharap, ada aktivitas yang dilakukan oleh PT ISI, sehingga bisa menyerap tenaga kerja lokal. (tin/and)

Editor: Andhika



Selain Pengembangan pangan, pemerintah juga memfokuskan pengembangan ternak kambing dengan memperdayakan Petani Milenial.

Empat Kabupaten di Kaltara jadi Lokus Pengembangan Pangan

TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, memetakan beberapa wilayah di Kaltara yang tengah dioptimalkan sebagai wilayah sentra pengembangan tanaman pangan.

Wilayah yang rencana dikembangkan sebagai sentral pangan, tersebar di empat Kabupaten di Kaltara. Seperti, kabupaten Bulungan terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah, dan Tanjung Palas Timur. Sedangkan di kabupaten Nunukan, tersebar di Kecamatan Sebatik, Kalambising, Krayan dan Nunukan.

Kabupaten Malinau, ada di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat dan Mentarang serta terakhir ada di Kabupaten Tana Tidung (KTT) yaitu di Tana Lia.

“Beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi, itu yang kita dukung untuk terus dikembangkan menjadi kawasan pengembangan tanaman pangan,” ucap kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiono, kepada wartawan Selasa (17/10/2023).

Selain itu, DPKP Kaltara saat ini

telah membangun sentra untuk pengembangan kakao di kabupaten Bulungan, dengan jumlah lahan yang disiapkan sekitar 1000 hektare (ha).

“Pada tahun ini, akan dibuatkan pemetaan wilayah potensi pengembangan tanaman kakao, pemetaan terhadap lahan Areal Penggunaan Lain (APL) perhutanan sosial dan akan diikutsertakan melalui lahan pertanian,” jelasnya.

Kemudian, untuk pengolahan lahan tersebut untuk dijadikan kawasan pengembangan kakao akan berkolaborasi dengan teman-teman dari Non Governmental Organization (NGO).

Sementara, untuk wilayah dengan potensi pengembangan buah-buahan seperti buah Durian di Kabupaten Nunukan seperti di Tulin onsoi, bakal diikuti serta untuk dikembangkan potensinya.

Sementara, untuk mendukung swasembada daging, kata dia, bakal dioptimalkan pada sentra pembalakan peternakan, belum lama ini pemerintah kaltara melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

(HKTI) Kaltara telah mengalokasikan bibit kambing ternak, untuk dikembangkan melalui petani milenial.

“Nanti kemudian, pemerintah akan mengembangkan dan melatih bagaimana membudidayakan ternak tersebut, supaya program dan rencana tersebut dapat berhasil,” tukasnya.

Sementara itu, ketua petani milenial Kaltara, Didi Kadarismanto saat dikonfirmasi menjelaskan akan siap mendukung rencana dan program pemerintah terlebih khusus dalam aspek pertanian. Baru-baru ini, kata dia Petani Milenial telah menerima penyerahan bibit kambing umbaran jenis jawarandu. Pengolahan akan menggunakan sistem umbaran.

“Sejauh ini, untuk program kami baru penyerahan kambing umbaran jenis jawarandu,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, kata Didi akan menerima penyerahan bibit jeruk manis jenis pontianak dan pembibitan pohon mangrove. (tin/and)

Editor: Andhika



ADE/MKR

Kegiatan Diskusi Rancangan Visi Misi dan Program LPDP Menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan oleh UGM.

Kaltara jadi Salah Satu dari 16 Provinsi Tujuan Talk Show LPDP UGM

TARAKAN - Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu dari 16 provinsi yang menjadi tujuan Talk Show LPDP UGM. Talk Show dilakukan bertujuan menghasilkan rancangan visi misi dan program LPDP menuju Indonesia emas tahun 2045.

Di Kaltara, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Swiss-Belhotel Tarakan, Senin (16/10/2023). "Sekali lagi saya dan segenap instansi pemerintah provinsi Kaltara menyambut baik diskusi ini dan merasa terhormat karena menjadi salah satu dari 16 provinsi yang menjadi tujuan talk show untuk menghasilkan rancangan visi dan misi dan program LPDP menuju Indonesia emas tahun 2045," ucap Gubernur Kaltara, Zainal, Senin (16/10/2023).

Zainal Arifin Paliwang menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, diskusi ini dapat mempertajam data serta informasi sebagai bahan perumusan visi dan misi dan Program LPDP Menuju Indonesia Emas 2045.

"Rencana visi dan misi program LPDP menuju Indonesia emas 2045 merupakan langkah yang strategis pastinya dalam mewujudkan visi Indonesia emas dan ini selaras dengan visi dan misi Kaltara untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera,"

kata Gubernur Zainal Arifin Paliwang.

Menurutnya, pencapaian Visi dan Misi tersebut dibutuhkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Selain itu, dibutuhkan SDM yang sehat, cerdas, inovatif, berakhlak mulia, produktif serta berdaya saing yang berbasis dengan pendidikan wajib belajar 19 tahun.

Dijelaskannya, LPDP merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembangunan SDM melalui proses beasiswa. Dengan demikian, LPDP telah memberikan kesempatan untuk putra dan putri terbaik Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar negeri.

"Provinsi Kaltara juga melakukan hal yang sama berupa pemberian Beasiswa Kaltara Unggul. Jadi, setiap tahunnya kami mengucurkan anggaran sejumlah 15 miliar untuk memberikan beasiswa untuk putra, putri kami mulai dari SD sampai perguruan tinggi bahkan yang melanjutkan kuliah diluar negeri," jelasnya.

Hal tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan program LPDP. Oleh karena itu, sebagai kepala daerah dia menyambut baik pertemuan dan diskusi yang telah berlangsung. Zainal pun berharap program ini tak hanya bermanfaat

untuk penyempurnaan visi dan misi serta program LPDP UGM namun, ini juga dapat menjadi bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan SDM di Kaltara.

Terpisah, Tim Perumus LPDP, Ratminto mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya merumuskan visi dan misi dan program LPDP menuju Indonesia emas tahun 2045. "Struktur nya seperti apa dan desain program nya seperti apa," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, Kaltara merupakan salah satu responden untuk merumuskan visi dan misi LPDP.

Dia lanjut menjelaskan bahwa visi dan misi LPDP mendukung Indonesia emas. Dahulunya, hanya berfokus pada pemberian beasiswa, namun kini ke hal hal yang lebih makro seperti diplomasi ke luar negeri.

Ratminto berharap melalui kegiatan diskusi ini terjadi keselarasan antara Pemerintah Daerah dengan Pusat terkait program LPDP. "Sehingga harapanya program LPDP dapat memberikan manfaat," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika

Libatkan 1.745 Personel, Polda Kaltara Gelar Operasi Mantap Brata di Tarakan

TARAKAN – Polda Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Operasi Mantap Brata untuk mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini diselenggarakan di Taman Berkampung Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (17/10/2023) dengan melibatkan 1.745 personel.

Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan, operasi Mantap Brata dilakukan sebagai bentuk upaya kepolisian untuk menyukseskan Pemilu 2024. “Setelah upacara tadi, ada kegiatan Sistem Pengamanan Komando Taktis. Kita mencoba peragaan sekaligus latihan. Ini menunjukkan kesiapan kita semua khususnya polisi dengan dukungan TNI dan stakeholders lain dan KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan pemilu 2024,” ucapnya usai kegiatan Operasi Mantap Brata.

Daniel tak menampik pemilihan Tarakan sebagai lokasi pelaksanaan Operasi Mantap Brata, karena wilayah tersebut terbilang rawan di Kaltara. Mengingat, penduduk di Tarakan yang cukup banyak. Operasi

Mantap Brata yang dilakukan pagi ini, lanjut Daniel, dilakukan dari eskalasi rendah hingga berat.

Harapannya, kepolisian sudah lebih siap baik terhadap situasi pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat sekalipun. “Di sini sudah disimulasikan terberat. Ketika yang terberat sudah siap maka yang teringan seyogyanya jauh lebih siap,” kata dia.

Untuk atensi titik rawan konflik pemilu di Kaltara, menurut Daniel, semua wilayah dianggap penting tak terkecuali daerah terpencil sekalipun. Dikatakannya, secara nasional Kaltara masuk ke dalam prioritas 2.

“Sebetulnya tidak begitu rawan, tapi kita harus siap terhadap kemungkinan terburuk,” tegasnya.

Berkaca dari Pemilu sebelumnya, potensi kerawanan Pemilu datang dari provokasi melalui berita hoax. Untuk itu, pihaknya telak melakukan berbagai upaya mencegah hal tersebut seperti cooling system.

Jenderal Bintang dua ini berharap tokoh masyarakat, media serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana aman, damai dan

kondusif di Pemilu 2024. “Mari ciptakan suasana aman damai kondusif dan tidak perlu terhasut informasi media sosial yang belum tentu kebenarannya,” ucapnya.

Dari beberapa tahapan yang sudah berjalan, Daniel mengatakan selama ini masih terpantau aman dan terkendali.

Kendati demikian, dia telah melakukan upaya preventif dengan memberi pembekalan kepada para personel terkait latihan pra operasi, pengamanan, ketentuan pemilu dan penanganen penegakan hukum terpadu dalam pemilu bersama KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait.

“Beberapa tahapan berjalan saat ini situasi aman terkendali. Kita inbau ciptakan situasi baik dan benar dan sama-sama kaltara rumah kita kita jaga rawat dan belajar dari pengalaman, kita benahi, pemilu berjalan lancar sukses,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia

Editor: Andhika





ADE/MKR

Suasana Pasar Murah di Masjid Al Maarif Tarakan.

Pasar Murah di Masjid Al Maarif Diserbu Warga Tarakan

TARAKAN - Pasar murah digelar di halaman Masjid Al Maarif, Selasa (17/10/2023) pagi tadi. Pasar murah ini menyediakan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, bawang merah dan lain sebagai. Bahan pokok ini dijual dengan harga yang lebih murah.

Pantauan mediakaltimara.com, warga Tarakan berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok terutama beras, gula dan minyak. Pasar murah yang dibuka mulai pukul 08.00 Wita ini, dalam dua jam berbagai bahan kebutuhan pokok sudah ludes terjual.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Elang Buana mengatakan, pasar murah ini merupakan kegiatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

“Sudah sejak kemaren dilak-

sanakan serentak, tapi Tarakan baru hari ini digelar pangan murah,” ucapnya saat diwawancarai di lokasi pasar murah.

Adapun barang-barang yang dijual antara lain beras, gula, minyak, telur, ikan dan lain sebagainya. Dia menyebut umumnya bahan pokok yang dijual merupakan penyumbang inflasi.

Elang menjamin harga bahan pokok yang di jual di pasar murah ini dijual dengan harga lebih murah. Seperti Minyak Kita dijual dengan harga Rp 12 ribu per liter kemudian gula Rp 13 ribu. Adapula beras yang biasanya di pasaran di jual Rp 70 ribu untuk lima kilogram. Namun disini tersedia beras Bulog dengan ukuran yang sama hanya saja harganya lebih murah hanya Rp 54 ribu.

“Kita kerjasama dengan Dinas Pangan, Perikanan, Bulog dan rekan rekan dari distributor pangan di Tarakan untuk pasar murah ini,”

katanya.

Dia melihat antusias masyarakat cukup tinggi dalam kegiatan pasar murah ini. Terbukti, baru beberapa menit dibuka, beberapa komoditi seperti beras sudah ludes terjual.

“Ini kebetulan beras habis baru beberapa menit dan ini nanti bawa lagi dari Bulog kerja sama dengan Dinas Pangan dan Dinas Perikanan, distributor pangan termasuk Bulog, hasil olahannya termasuk baik pangan segar dan olahan. Ini rencana sampai sore karena antusias sangat besar sekali,” ungkapnya.

Melihat antusias masyarakat yang besar tersebut, pihaknya kemungkinan akan melaksanakan kembali kegiatan pasar murah ini. Namun, dia enggan menyebutkan secara detail waktu pelaksanaannya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Layanan Satu Klik



KASUS 21 IUP PALSU JADI TANTANGAN PJ GUBERNUR AKMAL MALIK

BACA HALAMAN 2



DUTA PELAJAR SADAR HUKUM KALTIM 2023, AGEN PERUBAHAN DARI GENERASI MILENIAL

BACA HALAMAN 29

Kasus 21 IUP Palsu Jadi Tantangan PJ Gubernur Akmal

Dalam Penanganan Tambang Ilegal di Kaltim

SAMARINDA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) segera memetakan permasalahan aktivitas pertambangan ilegal di provinsi tersebut untuk mencari solusi yang tepat guna kepentingan hajat orang banyak.

"Kami harap ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan menyangkut hajat hidup orang banyak yang dirugikan oleh aktivitas pertambangan ilegal," kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Selasa.

Akmal mengaku dirinya belum mengetahui secara detail potensi dan permasalahan tambang ilegal di daerah itu, dan akan berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

"Masyarakat Kaltim juga hidup dari pertambangan. Kaltim memiliki potensi pertambangan yang besar dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang," ujarnya.

Menurut dia, terkait dampak negatif dari aktivitas pertambangan ilegal, pihaknya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat.

Akmal menuturkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota untuk menangani permasalahan tambang ilegal itu.



Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik

Sebelumnya, anggota DPRD Kalimantan Timur M. Udin mendesak penjabat Gubernur Kaltim untuk menindaklanjuti kasus dugaan 21 izin usaha pertambangan (IUP) palsu.

"Kami berharap kepemimpinan Akmal Malik memberikan informasi yang sedetail-detailnya kepada Pol-da Kaltim, sampai permasalahan 21 IUP palsu itu selesai," kata Udin.

Mantan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim itu mengatakan ka-

sus 21 IUP palsu sudah berlangsung lama, dan merugikan negara serta masyarakat.

"Sampai saat ini, belum ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah terkait aktivitas penambangan ilegal batu bara," ujarnya.

Berdasarkan catatan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menyebut hingga 2023 sebanyak 45 kasus korban meninggal akibat aktivitas pertambangan ilegal itu. **(ANT/MK)**



Drs. Edi Damansyah, M.Si - H. Rendi Solihin
Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Dafiq Haryanto, S.Sos, M.Si
Kadis Kominfo Kutai Kartanegara



PROKOMKUKAR

Bupati Kukar, Edi Damansyah, saat menyerahkan secara simbolis bantuan WC individual dan bangunan bedah rumah.

Bupati Edi Serahkan WC Individual dan Bangunan Bedah Rumah di Desa Embalut

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menyerahkan secara langsung bangunan bedah dan pembangunan WC individual, untuk warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang. Penyerahan secara simbolis ini, merupakan realisasi dari program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kukar.

Edi mengatakan, program bedah rumah dan pembangunan WC individual menjadi salah satu bagian program dedikasi Kukar Idaman yang masuk dalam Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK). Bentuk kolaborasi Pemkab Kukar bersama

dunia usaha dalam mempercepat penanganan kemiskinan.

“Dengan adanya bantuan pembangunan WC individual dan serah terima bangunan program bedah rumah ini, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di (Desa) Embalut,” jelas Edi.

Dengan adanya pembangunan WC individual ini, Edi meminta warga tidak lagi menggunakan WC atau jamban yang berada di bantaran Sungai Mahakam. Karena WC atau jamban menjadi salah satu indikator, warga tercatat sebagai warga miskin.

Sementara penerima bantuan bedah rumah, bisa memanfaatkan

dan menjaga bangunan yang sudah dikerjakan. “Disperkim bersama camat maupun kades agar inventarisir kembali, dilihat dari dokumentasi masih ada yang kurang rampung secara keseluruhan dan mungkin nanti bisa dimasukkan pada tahap berikutnya,” lanjut Edi.

“Pemkab Kukar akan terus berupaya melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya agar kemiskinan di Kukar bisa berkurang setiap tahunnya,” tutup Edi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor :

Kelurahan Melayu Kembangkan 5 Unit Bank Sampah, Sumber Pemasukan Baru Warga

TENGGARONG - Pengembangan bank sampah coba dilakukan oleh Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Menjadikan tumpukan sampah yang tidak berharga, menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi warga dalam pengelolaan bank sampah. Untuk saat ini, sedang dalam proses pencarian lahan dan bangunannya.

Lurah Melayu, Aditya Rahkman, dengan kendala lokasi dan gedung yang belum ada, maka dirinya menar-

getkan pada 2024 bank sampah di Kelurahan Melayu sudah berjalan. Tentunya dengan pemenuhan peralatan, salah satunya mesin pencacah sampah. "Rencana itu yang akan kami buat kalau sudah ada bangunannya," ujar Aditya.

Sejauh ini, sudah ada 4 unit bank sampah yang dikelola warga Melayu. Meski diakuinya belum berjalan secara maksimal, disebabkan kultur dan wilayah masing-masing RT, serta kesadaran warganya.

Setidaknya ada 5 Rukun Tetangga (RT) yang kini memiliki bank sampah. Masing-masing di Kelurahan Induk 1 unit. Sisa ya masing-masing 1 unit di RT 47, RT 38, RT 42 dan RT 44. "Jadi rencana 4 unit bank sampah itu yang akan kami kembangkan. Karena dari situ dalam proses pengelolaan sampah dan penjualannya tepat," tutup Aditya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ISTIMEWA

Lurah Mangkurawang, Sufiansyah

Sejumlah Program Disiapkan Mangkurawang, Mulai Normalisasi dan Bantuan Perikanan

TENGGARONG - Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), berencana melakukan normalisasi anak Sungai Mahakam yang mengalir di kawasan Mangkurawang. Menjadi satu dari sejumlah program yang dipersiapkan pada APBD Perubahan (APBD-P) Kukar 2023. Disamping ada pengerjaan perbaikan jalan dan gang.

Lurah Mangkurawang, Sufiansyah, menyebutkan jika normalisasi sungai tidak segera dilakukan, maka akan berdampak bagi kelanjutan

para petani di tiga wilayah. Yakni yang berada di Desa Bendang Raya, Rapak Lambur dan Spontan.

"Tiga daerah atas tidak bisa menyahawah. Mereka kebanjiran, kalau sungai dinormalisasi otomatis mereka dapat bersawah di atas," ungkap Sufiansyah.

Selain itu, peningkatan produktivitas kelompok petani dan nelayan juga tidak luput dari bantuan yang disalurkan oleh Kelurahan Mangkurawang. Yakni penyaluran bantuan tiga unit perahu ces dan enam unit mesin ketinting.

Dimana ada 10 pembudidaya ikan keramba dan 3 kelompok nelayan.

Dirinya berharap pada tahun berikutnya, para nelayan, petani dan kelompok pembudidaya ikan bisa memperoleh bantuan lebih banyak lagi dari Pemkab Kukar. "Kelurahan Mangkurawang berterima kasih atas bantuan yang diberikan setiap tahunnya. Mudah-mudahan bantuan ini lebih besar dan lebih banyak lagi, kami mengharapkan begitu," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Dua RT di Kelurahan Melayu Bakal Dimekarkan

TENGGARONG - Banyaknya jumlah warga di dalam satu Rukun Tetangga (RT), membuat Kelurahan Melayu berencana memekarkan dua RT. Yakni masing-masing untuk RT 29 yang berada Gang Wakaf Jalan Danau Aji, dan RT 35 yang berada Jalan Gunung Pegat. Dengan alasan jumlah Kepala Keluarga (KK) di 2 RT tersebut tidak lagi memenuhi syarat.

"Itu minimal bisa menjadi dua TPS (Tempat Pemungutan Suara), standarnya itu satu RT 50 KK, tapi sekarang di RT itu sudah sampai 100," ujar Lurah Melayu, Aditya Rahkman.

Namun, potensi pemekaran tersebut sepertinya harus ditinjau ulang olehnya. Lantaran terkendala dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupa program Rp 50 juta per RT. Jika ini direalisasikan, maka RT baru tidak akan terakomodir oleh program dedikasi Kukar Idaman tersebut.

"Takut nantinya ada kecemburuan sosial, belum lagi insentif perangkat RT-nya belum diakomodir," lanjutnya.

Sehingga hal yang memungkinkan untuk dilakukan berupa memecah warga ke dalam RT yang warganya masih sedikit. Yakni membagikan ke RT 35 dan RT 48.



ISTIMEWA

Lurah Melayu, Aditya Rahkman

Bahkan untuk batas wilayahnya pun sudah klir. Hanya saja kembali kepada warga, ingin memilih pindah ke RT yang mana diantara dua RT tersebut. "Karena nanti berubah lagi administrasi, KTP, KK, dan surat tanahnya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

TOYOTA LET'S GO BEYOND

Satu Indonesia

BOOKING THS SAJA

BTS di Digiroom

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo **BTSOLI**

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Garansi 3 Tahun / 100.000 km
TOP BRAND
BEST BRAND

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

Bontang



Belajar dari BPBD DIY, Peserta Pelatihan Tingkatkan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Kaltim

YOGYAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim menyelenggarakan kegiatan Benchmarking ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bagi Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana tahun 2023 Provinsi Kaltim. Kegiatan ini berlangsung, Selasa (17/10/2023) di Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan Benchmarking tersebut Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DIY, Drs. Noviar Rahmad, M.Si, Sekretaris BPBD Provinsi DIY, Marlina Handayani, S.Pd, MM, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi DIY, Lilik Andi Ariyanto, S.IP, MM, serta jajaran BPBD Provinsi DIY, pejabat administrator, widyaiswara BPSDM Kaltim, dan analis Bangkom BPSDM Provinsi Kaltim, panitia penyelenggara dari Bidang PKT BPSDM Kaltim, serta peserta.

"Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang berbahagia, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME, karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Benchmarking Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2023," ujar Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, MAP saat memberikan sambutan pembukaan Benchmarking.

Nina Dewi menjelaskan bahwa kegiatan benchmarking ini merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 09 sampai dengan 12 Oktober 2023 lalu.

"Adapun tujuan kegiatan ini adalah

untuk belajar dari pengalaman BPBD Provinsi DIY mengenai proses dan sistem manajemen operasional pada penanggulangan bencana," katanya.

Dalam kegiatan benchmarking ini, peserta akan melihat praktik terbaik yang telah diterapkan BPBD DIY. Peserta akan mendiskusikan strategi penanggulangan bencana yang telah teruji, teknologi yang digunakan dalam pemantauan dan peringatan dini, serta cara terbaik untuk melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

"Saya yakin, hasil dari kegiatan benchmarking ini akan menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat kita dalam menghadapi bencana di masa depan," pungkasnya.

Nina Dewi berharap semua peserta yang telah hadir dan berkontribusi dalam acara ini dapat mengikuti sesi benchmarking ini dengan semangat

dan keterbukaan untuk belajar satu sama lain.

"Selamat mengikuti acara ini, dan mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana karena Bencana adalah Urusan Kita Bersama," tutupnya.

Diketahui, Benchmarking adalah praktik membandingkan ukuran kinerja utama, tren, dan proses manajemen dengan organisasi sejenis. Ini adalah alat yang sangat berharga untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Organisasi dan area potensial untuk perbaikan.

Kegiatan dalam Benchmarking adalah membandingkan suatu kegiatan antar organisasi yang telah dicapai untuk meraih formula yang baru dan pas bagi peserta Benchmarking untuk dipraktikkan di daerahnya. **(Han/ADV/BPSDM)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Rangkaian Kegiatan Benchmarking di Yogyakarta.



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Sekcab PPU Tohar saat menghadiri Gran Opening BNI KCP Sepaku, Selasa (17/10/2023).

Hadiri Grand Opening BNI KCP Sepaku, Sekcab PPU; Kontribusi Percepatan Pembangunan Daerah

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mendukung hadirnya industri perbankan di wilayah Kecamatan Sepaku. Hal ini memastikan adanya dukungan finansial warga di sana dalam mengembangkan usahanya.

Sekcab PPU, Tohar menghadiri kegiatan Grand Opening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sepaku, kabupaten PPU, Selasa, (17/10/2023). Ia mengatakan

pemerintah daerah menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran BNI yang telah berkontribusi dalam upaya mendorong pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

"Keberadaan BNI di Sepaku tentunya akan sangat relevan dalam mendukung infrastruktur finansial

yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi dan investasi di sekitar kawasan ini," ujarnya.

Selain itu, BNI KCP Sepaku ini juga merupakan salah satu langkah menuju pembangunan yang lebih besar dan berdampak luas di wilayah PPU. Terutama dengan adanya proyek monumental, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku tambah dia tidak hanya menjadi proyek nasional yang luar biasa, tetapi juga membawa potensi perkembangan signifikan bagi PPU," jelasnya.

Selain itu, adanya BNI KCP Sepaku juga akan membantu para pelaku bisnis lokal dan nasional. Untuk dapat memiliki akses yang lebih mudah dan efisien, dalam pelayanan keuangan yang mendukung perkembangan proyek IKN.

"Saya yakin dan percaya bahwa BNI sebagai mitra finansial yang handal, akan dapat berperan penting dalam mendukung transaksi keuangan, investasi, dan perkembangan usaha di sekitar kawasan IKN Nusantara," terang Tohar.

Sementara itu Direktur Network dan Services PT BNI Persero Tbk, Rony Venir berharap BNI mampu berkontribusi bagi daerah khususnya di PPU. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan BNI KCP Sepaku telah melalui tahapan dengan konsep yang berbeda.

"Mudah-mudahan dengan hadirnya BNI di kecamatan sepaku ini bisa meningkatkan perekonomian di wilayah IKN, khususnya di kecamatan sepaku, kabupaten PPU," tutupnya. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Rapat koordinasi beberapa unsur di lingkup Pemkab PPU dan KLHK secara virtual.

Pemkab PPU Koordinasi dengan KLHK Tangani Karhutla

PPU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada 2023 ini masih terbilang tinggi. Untuk itu, Pemkab PPU berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penanganan dan pencegahannya.

Menurut data pusat pengendalian dan operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, kejadian karhutla dalam rentang waktu 2023 sebanyak 90 kali. Dengan total luas sebanyak 208,35 hektare.

“Untuk menekan intensitas karhutla tersebut Kami kembali mengambil langkah cepat dan tepat dengan melakukan koordinasi terpadu,” ujar Pj Bupati PPU, Makmur Marbun (17/10/2023).

Adapun pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Thomas Nifinluri. Kemudian juga dengan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan Yudho Sekti Mustiko, Kepala Seksi wilayah III Kaltimarta Balai PPI Wilayah Kalimantan.

Makmur mengatakan tingginya intensitas karhutla di wilayah PPU memerlukan tindakan konkret dalam menekan tingginya kasus tersebut. Untuk menekannya, sambungnya, perlu adanya berkolaborasi dari semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

“Ini merupakan langkah proaktif, menjaga kelestarian alam dan melindungi masyarakat dari dampak yang mungkin timbul,” jelasnya.

Dari komunikasi itu, diketahui KLHK siap mendukung kekuatan personil sarana dan prasarana. Serta melakukan upaya pencegahan

karhutla secara permanen dengan melakukan indentifikasi pemantauan dan deteksi dini di wilayah yang rawan.

Selain itu, Pemkab PPU juga akan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana penanganan karhutla secara bertahap. Kemudian juga akan dibentuk lagi tim tangguh bencana, yang diawali dengan pembentukan desa tangguh bencana (destana).

Kemudian juga dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Serta Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang merupakan bagian dari program pembentukan destana.

“Tetap dengan melakukan harmonisasi program Kementerian Lingkungan LHK dengan program BPBD serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan,” pungkas Makmur. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Sosialisasi SP4N-LAPOR! diikuti oleh para aparatur desa/kelurahan, Selasa (17/10/2023).

Diskominfo PPU Gelar Sosialisasi SP4N-LAPOR! di Kecamatan Waru

PPU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N – LAPOR!) pada kelurahan dan desa di Kecamatan Waru, Selasa (17/10/2023).

Sekretaris Diskominfo PPU Herlambang, mengatakan saat ini kita memasuki era keterbukaan informasi. Sehingga dengan tujuan pemerintah kaitannya dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kita dituntut untuk serba tahu dan serba bisa.

“Agar pemahaman kita sama terhadap keterbukaan informasi publik dan menjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu berikan sosialisasi terkait kebebasan berpendapat, melaporkan, dan kebebasan mengadakan sesuatu,” ungkapnya.

Sosialisasi SP4N-LAPOR! merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di empat kecamatan

se-PPU. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat setempat.

“Kami berharap sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik dan terkumulasi keingintahuan bapak ibu terhadap SP4N-LAPOR! serta ucapan terima kasih kepada Kecamatan Waru telah memfasilitasi kegiatan ini,” tutur Herlambang.

Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfo PPU Roinald Pagayang menambahkan sosialisasi aparat desa/kelurahan adanya aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional.

“Melalui SP4N pemerintah daerah mendapatkan masukan dari masyarakat, penyelenggara memiliki kesempatan melakukan segala macam perbaikan, penyelenggara pelayanan publik memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi sebuah peluang untuk memulihkan dan meningkatkan kepuasan serta masyarakat percaya pada ki-

nerja pemerintah dan membangun citra positif di mata masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, SP4N-LAPOR! bertujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat. Secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik,

“Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas Roinald.

Nantinya lanjut Roinald masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan aspirasinya melalui laman website www.lapor.go.id. Atau melalui SMS dengan ketik PPU (spasi) isi laporan kirim ke 1708 serta melalui aplikasi android yang dapat di download di Play Store dan App Store untuk iOS.

“Diharapkan layanan aspirasi dan pengaduan SP4N-LAPOR) menjadi satu-satunya kanal aduan layanan publik yang berbasis digital dan digunakan seluruh instansi Pemerintah,” pungkasnya. (ADV/SBK)



DISKOMINFO PPU FOR MEDIKALTIMGROUP

Para pegawai kehumasan dan BKPSDM PPU mengikuti gelaran workshop, Selasa (17/10/2023).

Pemkab PPU Kirimkan Pranata Humas Ikuti Workshop Pranata Humas Se-Kaltim

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengirimkan pejabat fungsional hubungan masyarakat (Humas) untuk peningkatan kompetensi kehumasan. Dalam kegiatan Workshop Pranata Humas yang digelar Diskominfo Kaltim, Selasa (17/10/2023)

Adapun yang dikirimkan dalam kegiatan kali ini selain pegawai humas, juga pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU yang membidangi jabatan fungsional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menyampaikan setelah adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, telah banyak peraturan baru yang mencabut peraturan lama. Sehingga perlu adanya sosialisasi terkait kebijakan tersebut termasuk peraturan mengenai angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan Fungsional.

"Berdasarkan peraturan tersebut juga, mulai 2023 angka kredit konvensional juga diperoleh dari penilaian kerja dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga tidak ada lagi penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)," ucapnya.

Workshop Pranata Hubungan Masyarakat Seluruh Kaltim 2023 digelar di Balikpapan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pranata humas serta menyamakan persepsi mengenai beberapa mekanisme. Seperti penyesuaian angka kredit konvensional yang dikonsolidasikan ke dalam angka kredit integrasi serta penetapan angka kredit integrasi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SIMPIONI)

Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lebih lanjut, sosialisasi mengenai peraturan baru yang dijelaskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Workshop ini juga menambah pengetahuan peserta mengenai media sosial dan pelayanan publik dengan menghadirkan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Hairunnisa.

Faisal menyebut bahwa kebijakan penyetaraan jabatan dalam jabatan fungsional pranata humas harus diikuti dengan penyetaraan pengetahuan mengenai kehumasan. Ia berharap para pranata humas hasil penyetaraan dapat terus meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal.

"Ini merupakan tantangan bagi pranata humas dan PR bagi kami dalam penyetaraan dari berbagai latar pendidikan," tutup Faisal. (ADV/SBK)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

Dorong Realisasi Perda Perlindungan Bahasa dan Budaya

TANJUNG REDEB - Batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun sudah memasukkannya dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perlindungan Bahasa dan Budaya.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menuturkan, kehadiran perda tersebut belum berjalan maksimal. Sebab, belum ada aturan turunan berupa peraturan bupati (Perbup) yang mewajibkan semua masyarakat mengenakan pakaian khas daerah.

Ditegaskannya, pakaian batik selama ini belum menjadi sebuah keharusan untuk dikenakan oleh semua kalangan. Karena itu, kehadiran perda juga belum sepenuhnya menjamin maksimalisasi pembumih batik Berau tersebut.

"Perda kita perlindungan bahasa dan budaya itu ada. Tapi belum ada

realisasinya. Karena perbupnya belum ada, terutama untuk pakai batik sebagai pakaian khas Berau itu," jelasnya.

Diakui Elita, memang saat ini ada dorongan pemerintah agar batik dikenakan oleh para aparatur negeri sipil (ASN) setiap hari Kamis. Namun, hal itu masih fleksibel. Akibatnya, pada hari yang telah ditentukan, masih ada ASN yang tidak mengenakan batik.

"Jadi, saran saya jangan lagi imbauan tapi keharusan setiap hari Kamis. Kalau bicara keharusan pemerintah juga mesti support dengan anggaran," terangnya.

Sebagai sebuah keharusan, lanjut Elita, pengenaan batik juga tidak hanya berlaku untuk para ASN. Pihak swasta, lingkungan sekolah, dan masyarakat luas harus juga mengikuti aturan tersebut.

"Saya ingat di Malinau. Batik itu

rupanya diatur dalam Perbup. Sehingga waktu saya ke pasar, saya kaget karena bahkan pedagang pun wajib pakai batik. Kalau ada aturan kita yang mengharuskan, pasti masyarakat akan ikut," kisahnya.

Perbup yang perlu ada dan supporting anggaran dari pemerintah daerah, menurut Herlina, perlu dioptimalkan dan dimaksimalkan demi membumih batik di Berau serta dipakai oleh semua kalangan. Apalagi batik khas Berau sudah dikenal lewat berbagai event yang diikuti.

"Kalau sudah ada aturan dan supporting anggaran, saya yakin SDA dan SDM bisa diberdayakan dengan baik. Bahan-bahan yang diperlukan bisa diperoleh, juga para pengrajin bisa berkreasi. Itu pasti dengan sendirinya menyusul," tandasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

Minta Pemerintah Segera Selesaikan Proses PBG

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo menyoroti persoalan sulitnya masyarakat mendapat persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirinya menyebut, pemerintah harus menyelesaikan perizinan dari permohonan yang ada. Sebab, hal itu sebuah keharus. Terlebih proses pembangunan dapat terhambat akibat banyak PBG yang belum terbit.

"Kami banyak mendengar keluhan. Sistem yang digunakan untuk perizinan terlalu kaku. Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat," tegasnya.

Diamaparkan, kehadiran Rumah Sehat Baznas (RSB) yang mempunyai manfaat besar bagi masyarakat kurang mampu. Apalagi Rumah Sakit Umum belum mengakomodasi tuntutan kesehatan semua masyarakat.

"Kehadiran RSB ini turut membantu pemerintah dan warga Berau, karena kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada rumah sakit yang kondisinya kita ketahui bersama itu," terangnya.

Karena itu, Falen meminta proses perizinan tersebut segera diatasi. Apalagi pembangunannya sudah berlangsung sejak beberapa tahun

lalu. Jika tidak segera ditangani dengan baik, maka pemerintah dianggap kurang mempunyai kepekaan terhadap kesehatan masyarakat kecil.

"Sebab warga kita ini banyak juga yang tidak memiliki BPJS. Sehingga kalau tidak bisa dilayani di RSUD, bisa dilayani di RSB," imbuhnya.

Politikus Demokrat ini mengungkapkan, anggaran pembangunan RSB untuk kaum duafa juga berasal dari sedekah dan bantuan masyarakat. "Sehingga anggaran yang sudah diperoleh itu perlu dikelola secara baik," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung saat memberi bantuan pukot kepada nelayan.

Beri Bantuan Pukat, Harap Ekonomi Nelayan Meningkatkan

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung mendapat keluhan mengenai mahalannya harga pukat bagi para nelayan.

Menanggapi persoalan tersebut, dirinya memberi ratusan set pukat untuk nelayan di kampung tersebut melalui dana aspirasinya.

"Bantuan tersebut bertujuan meringankan beban para nelayan mengenai mahalannya harga pukat. Apalagi ini merupakan mata pencaharian mereka," ungkapnya.

Menurutnya, pemberian pukat tersebut dapat memicu peningkatan hasil tangkap ikan nelayan. Sehingga menambah pendapatan bagi

ekonomi mereka. Dinilai Nurung, harga pukat yang mahal, tentu saja cukup berat dirasakan masyarakat nelayan.

"Saya tidak ingin saja, mata pencaharian mereka terputus hanya karena soal pukat," tuturnya.

Nurung menambahkan, dengan adanya bantuan ini, para penerima bantuan bisa memanfaatkannya dengan baik untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas para pelaku usaha perikanan. Khususnya nelayan di Kampung Sukan Tengah.

"Yang kami harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," ujarnya.

Politikus NasDem ini turut menitip pesan kepada Dinas Perikanan Berau, agar setiap bantuan yang diakomodasi merupakan kebutuhan dari nelayan maupun pembudidaya perikanan.

"Semoga bantuan ini bermanfaat dan semuanya bisa dijaga dengan baik. Serta dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor perikanan," haranya. (adv/dez)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

Pengawasan Terhadap Puskesmas Harus Ketat

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk ketat melakukan pengawasan terhadap Puskesmas yang ada.

Dia menuturkan, jika pengawasan dilakukan secara aktif, maka akan berdampak baik terhadap peningkatan kualitas di Bumi Batiwakkal, sekaligus efektif dalam melakukan pengawasan serta tak hanya menunggu data masuk. "Jika hanya membaca data saja. Saya yakin kualitas kesehatan akan begini-begini saja," ucapnya.

Dirinya mengatakan, dengan fasilitas fisik yang memadai, harusnya sejalan dengan kualitas pelayanan yang ada. Tidak hanya pintar mem-

buat laporan tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. "Keluhan itu pasti ada. Kami berkali-kali menyampaikan hal ini ke Dinkes, agar jadi evaluasi," paparnya.

Dirinya mengungkapkan, alokasi anggaran untuk pembangunan puskesmas bukan sedikit, ditambah dengan obat-obatan dan fasilitas lainnya. Namun nyatanya masih banyak pasien yang harus rujuk.

Politikus PDI-P ini berharap, jika pasien bisa ditangani di puskesmas saja. Seharusnya tidak harus dirujuk. "Kalau semua dirujuk, terus obat bisa habis digunakan buat apa?" imbuhnya.

Rudi meminta perhatian dari dinas terkait untuk segera membenahi pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga tidak menjadi citra

buruk bagi masyarakat.

Begitu juga dengan perusahaan, hanya datangkan orang banyak dari luar, tapi enggan membangun klinik atau fasilitas kesehatan mandiri. "Pihak ketiga juga harus aktif dan jika perlu membantu pembangunan faskes di Berau," paparnya.

Dirinya melanjutkan, permasalahan kesehatan masih menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan soal pelayanan. Terlebih jika pasien tersebut merupakan pasien BPJS kelas III.

"Jangan beda-bedakan. Mereka juga membayarkan. Sumpah perawat dan dokter saya rasa tidak ada soal beda-bedakan pasien dari status sosialnya," tutupnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Yusuf

Pertanian Harus Diperhatikan Lebih, Jangan Biarkan Alih Fungsi Lahan Terjadi

TANJUNG REDEB - Perhatian lebih terhadap sektor pertanian dinilai Anggota Komisi II DPRD Berau, Yusuf membawa dampak positif terhadap ketahanan pangan.

Dia menilai, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pertanian, memicu maraknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Tentu hal tersebut menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di kabupaten paling utara Kaltim ini.

"Ini harus jadi perhatian serius, supaya tidak terus impor dari luar daerah. Saya khawatir semakin banyak alih fungsi lahan," ungkapnya.

Pemberian stimulan terhadap petani dinilainya wajib terus ditambah. Selain itu, terobosan terbaru juga perlu dilakukan. Begitu juga regenerasi petani wajib dilakukan.

Dirinya menyadari dunia pertambangan di Berau memang cukup menjanjikan. Namun menurut Yusuf, hal tersebut tentu tidak akan

bertahan lama.

"Animo masyarakat untuk sektor pertanian saat ini sangat kurang, perlu pembenahan sistem, maupun stimulan yang maksimal," tuturnya.

Menurutnya, masyarakat perlu kesejahteraan hidup dan di samping kesejahteraan yang diinginkan, perlu dorongan dari pemerintah, baik itu berbentuk penyuluhan rutin ataupun subsidi bahan pokok pertanian.

"Jadi, tidak salah bila masyarakat lebih memilih untuk berkebun sawit di lahan mereka dari pada harus bertani. Dari segi keuntungan saja banyak masyarakat yang sebelumnya bertani mengakui bahwa lebih menjanjikan biala dirinya berkebun dari pada bertani," terangnya.

"Ini juga sebagai bukti kurangnya perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap para pelaku pertanian kita," sambungnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, adanya kewajiban

ASN untuk mengonsumsi beras lokal bukanlah suatu keberhasilan bagi pemerintah daerah. Sebab, kata Yusuf, keberhasilan pemerintah daerah bisa dilihat apabila pelaku pertanian saat ini bisa sejahtera hidupnya.

"Dengan sikap pelaku pertanian saat ini yang banyak beralih ke perkebunan apakah itu bisa dikatakan sejahtera? Itu tandanya petani merasa tidak nyaman di posisinya yang sekarang," katanya.

Maka dari itu, Yusuf berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat berkaca dengan apa yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan hasil dari pelaku pertanian juga berpengaruh pada PAD.

"Hanya dengan memberikan bantuan bahan pokok bersubsidi dan kembali mengadakan petugas penyuluh pertanian di setiap daerah sudah bisa membuat para pelaku pertanian merasa diperhatikan kok," tutupnya. (adv/dez)



Program TP-BIS: Perpustakaan Kaltim Dorong Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan

SAMARINDA - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TP-BIS) merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Program TP-BIS termasuk ke dalam program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perpustakaan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi masyarakat akan semakin meningkat yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nikko Dwi Angga, Pustakawan Ahli Muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengungkapkan bahwa pelaksanaan program TP-BIS ini adalah salah satu upaya perwujudan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Ini adalah amanat tujuan berbangsa dan bernegara, termaktub dalam pembukaan UUD, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Nikko.

Menurut Nikko, perpustakaan tidak lagi hanya sekadar menjadi tempat menyimpan buku, tetapi harus menjadi agen perubahan, dengan cara menghadirkan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan TP-BIS menjangkau 18 perpustakaan. Untuk saat ini, di Berau sudah melaksanakan program TP-BIS secara mandiri.

"TP-BIS di Kaltim masih mencakup 18 perpustakaan, tetapi masih banyak desa dan kelurahan yang belum dijangkau karena beberapa faktor," ungkap Nikko.

Untuk kedepannya, DPKD Kaltim mencanangkan proyek TP-BIS dengan target 5 desa agar bisa direplikasi secara mandiri oleh kabupaten/kota, dan dibutuhkan sinergisitas antar stakeholder di daerah agar program ini dapat terimplementasi dengan baik.

"Ketika mencoba menjangkau semua kelurahan dan desa, kami terbatas oleh dana. Oleh karena itu, akan direncanakan untuk melaksanakan program TP-BIS di 5 desa

sebagai proyek autopilot. Namun, hal ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Semoga dapat teralisasi dengan baik," pungkasnya. (dsy/adv/DPKD)

Pewarta: Desy Alvionita

Editor: Agus Susanto



Nikko Dwi Angga, Pustakawan Ahli Muda

Buku 'Numerasi Batu Bertulis Yupa' Ditulis 3 Akademisi Kaltim: Ungkap Sejarah Kerajaan Martapura di Kutai

SAMARINDA - Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menerima kedatangan dua penulis Kaltim.

Kedatangan para penulis ini diterima dengan baik oleh Pustakawan Ahli Muda Fatimah Irny di Ruang Seksi Deposit dan Alih Media yang terletak di Lantai 3.

Fatimah menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah menyumbangkan buku hasil penelitian mereka terkait sejarah di Kaltim, khususnya mengenai tugu batu yupa yang pernah ditemukan di bantaran Sungai Mahakam di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

"Buku tersebut berjudul 'NUMERASI BATU BERTULIS YUPA', yang membahas tentang kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur," ungkapnya.

Fatimah mengaku sangat bangga dengan para penulis asal Kaltim ini, yang semuanya merupakan dosen di lembaga universitas yang ada di Kaltim. Ini karena sangat sedikit penulis yang memberikan perhatian terhadap peninggalan bersejarah seperti tugu batu yupa yang banyak ditemukan di Kaltim, terutama di Kutai Kartanegara.

"Tentu saja, buku ini akan lebih memperkaya koleksi konten lokal dan khasanah kearifan lokal Kalimantan Timur. Penelitian tiga akademisi ini berfokus pada prasasti Yupa, membawa pengetahuan baru dalam bidang matematika dan unsur-unsur etnomatematika," ujarnya.

Penulis buku "NUMERASI BATU BERTULIS YUPA" tentang kerajaan Martapura di Kutai, Kaltim, adalah tiga orang akademisi dari Samarinda, yaitu Fitria Nurul Hidayah, Kurniawan, dan Yulian Widya Saputra.

Fitria Nurul Hidayah adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, sementara Kurniawan dan Yulian Widya Saputra keduanya adalah dosen di Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta Program Studi Matematika Universitas Mulawarman (Unmul).

Para penulis menemukan penomoran bilangan matematika yang dulunya ditulis dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam huruf Pallawa berbahasa Sanskerta di atas Yupa, sebuah tongkat batuan beku monolit, yang merupakan peninggalan kerajaan Martapura di Kutai.

Tim penulis menghadapi kendala dalam menggarap tulisan ini, terutama dalam proses pencarian alih aksara Kuno, karena tidak semua orang memahami aksara tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan wawancara dengan ahli sejarah, yang memakan waktu satu tahun untuk berproses dengan ahli aksara Kuno yang ada di Museum Nasional.

"Mereka harus menyesuaikan jadwal pertemuan dengan beliau karena memang orang yang menguasai aksara Kuno tersebut sangat langka, bahkan ada yang berada di Kaltim. Beliau membantu kami dalam penulisan huruf Pallawa, karena saat ini hampir tidak ada yang memahami Bahasa Sanskerta," kata salah seorang penulis, Kurniawan.

Buku yang mengkaji numerasi ini dikaji melalui pendekatan ilmu sejarah dan dipadukan dengan multidisiplin ilmu, seperti geografi dan matematika (etnomatematika).

Diharapkan keterpaduan ketiga disiplin ilmu ini dapat mengungkap kegiatan numerasi masyarakat nusantara yang terwakili oleh kerajaan Martapura (Kutai kuno) di Kalimantan Timur.

"Prasasti Yupa menggunakan Bahasa Sanskerta dengan Aksara Pallawa. Numerasi yang ditemukan berhubungan dengan kuantitas dan bilangan," ujar Kurniawan.

Numerasi Kerajaan Kutai pada masa Hindu-Buddha abad ke-5 Masehi dalam teks Sanskerta diartikan sebagai "Aika," yang dalam Bahasa Indonesia berarti "Satu." Kata "Dasa" berarti sepuluh. "Aikadasa" berarti sebelas. Kosakata "aika," "dwi," "tri," dan seterusnya memiliki arti urutan atau penomoran anak dalam sebuah keluarga, selain itu, juga memiliki makna sebagai tanggal lahir seseorang.

Dulu, "Aika" menandakan angka satu, namun pada zaman sekarang ada perubahan fonem menjadi "Eka," yang menandakan anak pertama atau angka satu. Pagi ini, bersama dua penulis dan pengunjung, mereka dengan penuh semangat berharap bahwa buku yang mereka sumbangkan dapat dibaca oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Kaltim.

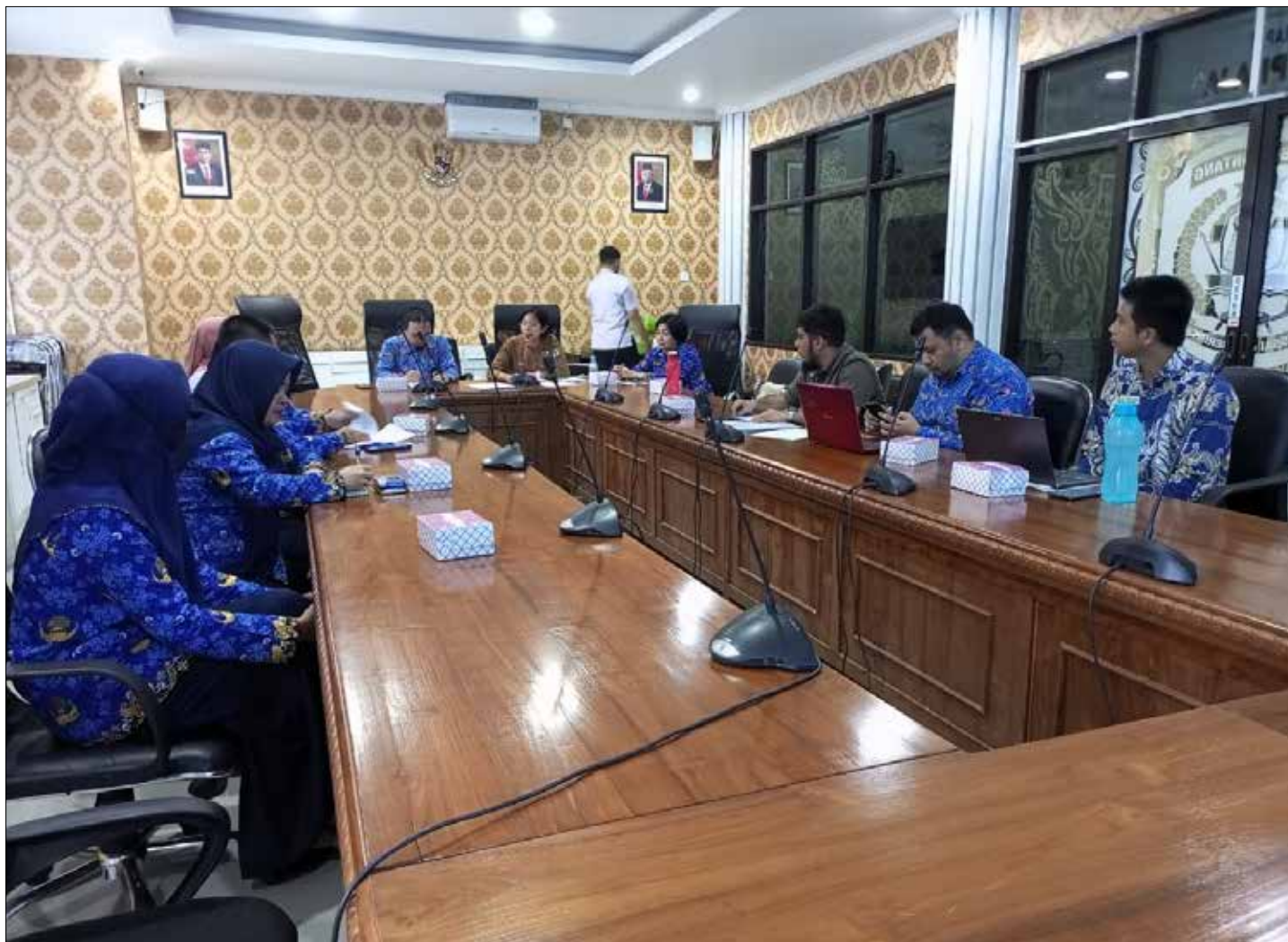
"Masyarakat perlu mengetahui bahwa di Kaltim ini ada aksara Kuno yang tertulis di batu Yupa," pungkas Kurniawan (ADV/Han/DPKD)

Pewartu: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Buku "NUMERASI BATU BERTULIS YUPA" tentang Kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis tiga akademisi dari Samarinda, yaitu Fitria Nurul Hidayah, Kurniawan, dan Yulian Widya Saputra.



IST

Kunjungan Ombudsman ke DPMPTSP Bontang.

DPMPTSP Bontang Dapat Kunjungan dari Ombudsman

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang menerima kunjungan dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (17/10/23).

Ombudsman memiliki tugas untuk melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara.

Kunjungan ini bertujuan untuk menilai bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintah merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien, guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga, yang merupakan unsur pent-

ing dalam konsep demokrasi, untuk mencegah dan menghapus penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara dan pemerintah.

"Kami menilai layanan pemerintah, bagaimana mereka melayani publiknya. Hari ini kami datang dalam kunjungan kedua, yaitu supervisi, untuk mengkonfirmasi penilaian kunjungan pertama, demi menjaga integritas OPD," tutur Ignasius Ryan Gamas, Asisten Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim.

Selama proses penilaian, semua berjalan dengan baik, mulai dari wawancara hingga website. Namun, hanya terdapat satu permasalahan terkait satu layanan di website DPMPTSP, yang tidak dapat digunakan.

"Tahun lalu, memang DPMPTSP ini berada dalam zona kuning, namun

kemungkinan tahun ini akan lebih baik," tambahnya.

Natalia Santi Kanan, Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, menjelaskan bahwa kunjungan ini bersifat mendadak. Setelah dilakukan supervisi oleh provinsi, akan ada tindak lanjut oleh Ombudsman RI.

"Terkait masalah di website DPMPTSP, kami akan segera memperbaikinya, seperti yang telah dijelaskan. Perbaikan akan segera dilakukan oleh tim IT kami, dan selanjutnya akan dilaporkan ke dinas terkait, sehingga masyarakat dapat segera mengakses dan menggunakannya," pungkasnya. **(Sya/adv)**

Daftar 5 Jenis Usaha Paling Diminati

BONTANG - Kota Bontang menjadi tempat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan banyak perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi. Terdapat juga berbagai jenis usaha yang berdiri di Kota Bontang.

Terdapat 5 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang paling diminati di Kota Bontang, didominasi oleh jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman.

"Survei itu kita ambil dari yang diterbitkan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)," jelas Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DP-

MPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan saat ditemui, Selasa (17/10/23).

Santi mengungkapkan, bahwa setiap pelaku usaha di Kota Bontang secara sadar telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena mereka sadar dengan memiliki legalitas maka usaha mereka akan lebih diakui.

"Jadi pelaku usaha ini sadar pentingnya NIB untuk usaha mereka, kalau sudah memiliki NIB maka usaha mereka akan terdaftar di OSS-RBA," ujarnya.

Data ini terhitung sejak 4 Agustus 2021 hingga 16 Oktober 2023. Den-

gan jumlah usaha terbanyak adalah 638 usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman, kemudian yang kedua sebanyak 261 industri kerupuk, kripik, peyek, dan sejenisnya, ketiga sebanyak 259 berupa rumah atau warung makan.

Kemudian yang keempat sebanyak 253 usaha perdagangan besar alat tulis dan gambar, dan yang terakhir sebanyak 235 usaha penyediaan jasa boga periode tertentu.

"Data ini bisa terus bertambah dengan banyaknya warga yang hampir setiap hari mengurus usaha mereka," tutupnya. **(sya/adv)**



SYAKURAH/RADARBONTANG

Pelayanan di DPMPTSP.

Maksimalkan Pelayanan, DPMPTSP Buka Pengurusan Malam

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang membuka pelayanan terpadu perizinan malam (Padu Prima) sejak Mei 2022 lalu.

Pelayanan dibuka setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 19.30 sampai 20.30 Wita. Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bon-

tang, Natalia Santi Kanan menjelaskan, bahwa pelayanan itu dibuka untuk memudahkan masyarakat yang akan mengurus perizinan.

"Tentu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kami buka malam, karena kita tahu tidak semua orang bisa mengurus pagi atau siang," jelasnya.

Pelayanan malam terbilang cukup

ramai karena masyarakat yang mengurus tidak diburu oleh pekerjaan. "Kadang ramai kadang sepi, tapi kalau ramai kadang ramai banget," jelasnya.

Santi menambahkan, walaupun tidak selalu ada orang yang melakukan kepengurusan pada malam hari, tapi pihaknya tetap membuka pelayanan tersebut. **(sya/adv)**

Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023

BEIJING - Di sela kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden China, Xi Jinping, 15 - 18 Oktober 2023, Presiden RI menyaksikan kesepakatan PT PLN (Persero) dengan dua perusahaan besar energi bersih asal China dalam kerja sama pengembangan EBT di Indonesia pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing, China.

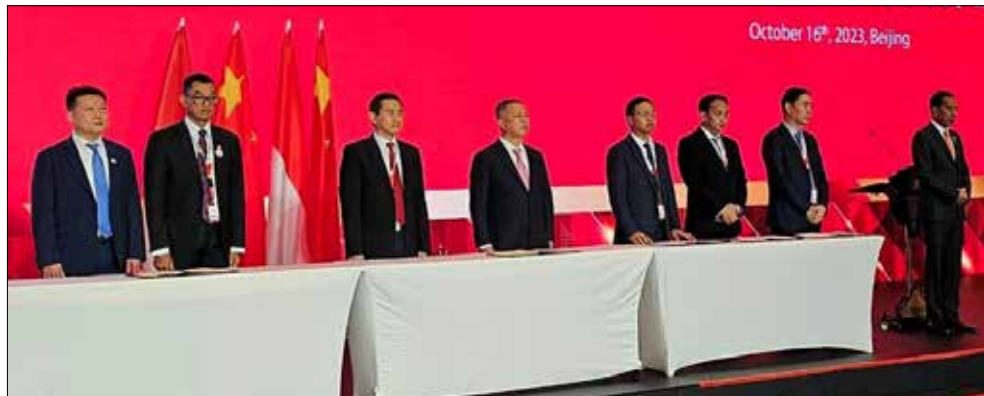
Selain dua MoU yang disaksikan Presiden Jokowi, PLN juga meneken tujuh MoU lainnya yang diteken PLN antara lain dengan The Export-Import Bank of China, Sinosure, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, State Development & Investment Corp. Ltd, Huawei Tech Investment, dan China Energy International Group dengan total nilai valuasi kerja sama (termasuk pendanaan) sebesar lebih dari 54 miliar USD.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan kunjungannya ke Beijing untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan China. Tiga isu prioritas yang diusung dalam pertemuan ini terkait ekspor, investasi dan ketahanan pangan.

"Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan China antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi, dan pembangunan ketahanan pangan," ungkap Presiden.

PLN mengambil peran penting dalam peningkatan investasi antara China dan Indonesia dalam sektor energi untuk mendukung komitmen pemerintah dalam akselerasi transisi energi di Indonesia. PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan State Grid Corporation of China (SGCC) dan Trina Solar China dalam pengembangan smart grid sebagai backbone kelistrikan energi bersih di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang juga mendampingi Presiden Jokowi di forum China-Indonesia Business Forum 2023 di Beijing, mengatakan PLN merasa terhormat dengan kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan energi kelas dunia yang ada di China. Den-



gan adanya forum ini, dirinya melihat partnership antarpihak akan semakin kuat.

Darmawan mengatakan, kerja sama dengan SGCC merupakan wujud kolaborasi bersama untuk dapat bergerak maju dalam transisi energi.

"PLN berharap melalui kerja sama ini, SGCC dan PLN dapat saling memperkuat satu sama lain. Bersama-sama, kita akan membangun jalur transmisi supergrid ramah lingkungan, smart grid, dan memperluas kemitraan ke depan," ujar Darmawan.

Nantinya, kerja sama antara PLN dan SGCC juga mencakup studi bersama dalam pemanfaatan energi terbarukan, penyimpanan tenaga listrik, integrasi jaringan listrik hingga manajemen jaringan cerdas untuk meningkatkan sistem tenaga listrik yang andal, berkualitas dan ekonomis.

Tidak hanya dengan SGCC, kerja sama PLN juga dilakukan dengan investor asal China lainnya, yaitu Trina Solar. PLN melalui PLN Indonesia Power Renewables melakukan joint venture dengan Trina Solar, Sinar Mas, dan Agra Surya Energi untuk pembangunan pabrik sel dan panel surya terbesar se-Indonesia di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

"Trina Solar ini perusahaan terkemuka dengan teknologi masa depan. Bersama-sama, kami telah meluncurkan joint venture manufaktur Solar PV. Kami akan memperluas kapasitas dan produksi untuk memasok pasar Solar PV skala besar di Indonesia," ujarnya.

Darmawan melanjutkan, pembangunan manufaktur Solar PV di Kendal

menunjukkan semangat kolaborasi yang terus diusung PLN. Hal ini semata-mata untuk memaksimalkan potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar, mencapai 207 Gigawatt (GW).

Kolaborasi seperti ini diharapkan bisa mengakselerasi skenario transisi energi pemerintah Indonesia yang ambisius, dengan target 75 persen penambahan kapasitas energi berasal dari energi terbarukan dan 25 persen sisanya dari gas alam pada tahun 2040.

Kesepakatan ini merupakan komitmen PLN guna mendukung pemerintah yang gencar mengundang investasi ke Tanah Air di bidang energi baru terbarukan.

"Forum seperti ini menunjukkan perubahan besar. Dari kita yang sebelumnya terfragmentasi, menjadi satu kesatuan. Ini sekaligus memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus bergerak maju demi masa depan yang lebih baik," pungkas Darmawan.

Adapun forum China-Indonesia Business Forum yang merupakan bagian dari The Third Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) yang diinisiasi oleh Chamber of Commerce Committee Tiongkok.

BRF bertujuan menjalin kolaborasi dunia internasional yang meliputi konsultasi ekstensif, kontribusi bersama yang menguntungkan, menjalin kerja sama terbuka, hijau, bersih, dan berstandar tinggi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. (adv)



DWI S

Penanganan dokter saat melakukan pemeriksaan pasien di RSUD Bontang.

Ada 55 Dokter di RSUD, Bakal Tambah Lagi Spesialis

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang saat ini memiliki kurang lebih 55 dokter. Terdiri dari 35 dokter spesialis dan 1 sub spesialis, serta 20 dokter umum.

Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mengatakan, ke depannya RSUD bakal menambah lagi jumlah dokter, yakni spesialis jantung.

"Sekarang dengan antrian yang sangat panjang, dan dokter jantung di sini mengcover di pelayanan intervensi, di poli sera ruangan, sehingga kurang maksimal. Agar lebih maksimal, kami akan menambahkan satu dokter lagi untuk spesialis jantung," ucapnya saat diwawancarai Radar-bontang.com, Senin (16/10/2023) kemarin.

Selain penambahan dokter spesialis jantung, ada juga dokter yang akan bergabung dengan RSUD Bontang, yakni dokter gigi ortodonti. Dimana

dokter gigi ortodonti ini akan membuka pelayanan poli baru.

"Inshaallah di akhir tahun, dokter gigi ortodonti yang akan membuka pelayanan poli baru," paparnya.

Saat ini, juga ada beberapa dokter yang disekolahkan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis. Yaitu dua dokter umum mengambil bedah plastik dan gigi (penyakit gigi). Serta, ada juga dokter spesialis masih bersekolah untuk mengambil sub spesialis Konsultan Intensive Care (KIC). Dari Dinas Kesehatan dokter bedah saraf, ortopedi, serta gigi (spesialis gigi tiruan).

"Untuk yang disekolahkan ada PNS disini dari RSUD Bontang, dan dari Dinas Kesehatan. Kalau di RSUD ada dua yang masih sekolah, dua dokter umum, mengambil bedah plastik dan gigi (penyakit gigi). Dokter spesialis juga ada untuk KIC, yang akan berkolaborasi dengan bedah ontopologi

penanganan tumor," jelasnya.

Di RSUD Bontang ada beberapa dokter, yakni dari dokter penyakit dalam, dokter kandungan (kebidanan), dokter bedah mulut, konservasi gigi, dokter gigi anak, dokter bedah, sub spesialis bedah otopologi, dokter THT, dokter mata, dokter TH medik, dokter bedah tulang, dokter jiwa, dokter penyakit kulit kelamin, serta anastesi.

Ratna menambahkan, harapannya dokter-dokter yang ada mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Serta juga dengan sesuai standar sebagai tipe rumah sakit B, rumah sakit sebagai rujukan yang memiliki penanganan yang paling kompleks. Selain itu juga dapat mengembangkan berbagai jenis layanan sub spesialis lainnya. (Dwi/adv)



DWI S

Beberapa ruang poliklinik di RSUD Taman Husada.

Terus Bertambah, RSUD Punya 24 Poliklinik

BONTANG – Jumlah poliklinik di RSUD Taman Husada terus bertambah tiap tahun. Penambahan ini guna meningkatkan pelayanan, dan melengkapi kebutuhan kesehatan masyarakat Bontang.

Di tahun 2019 lalu, rumah sakit yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman, Nomor 01 ini telah memiliki 21 poliklinik. Di tahun 2022 bertambah tiga poliklinik, yakni Konservasi Gigi, Ortopedi, serta Lepra. Sehingga saat ini total jumlah poliklinik di RSUD berjumlah 24 poliklinik.

Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mengatakan, penambahan poliklinik

berlangsung hingga tahun 2022. Di tahun 2023 ini belum ada penambahan lagi.

“Poliklinik ortopedi yang dimaksud adalah untuk pembedahan tulang. Sedangkan lepra atau pemeriksaan patologi anatomi. Sebenarnya lepra ini bukan klinik, hanya saja pelayanan dari penegak diagnosa. Untuk memeriksa jaringan tubuh, memeriksa cairan tubuh untuk dilihat di bawah alat mikroskop, melihat sel-selnya. Ada tidaknya sel ganas,” ucapnya saat diwawancarai awak media, Senin (16/10/2023).

Walaupun belum ada lagi penambahan poliklinik, namun ada beberapa

poliklinik yang berpindah ke gedung B. Adanya perpindahan sebagian poli klinik, agar dapat membuat para pasien menjadi sangat nyaman.

“Seperti dokter gigi, yang awalnya hanya berada pada satu tempat menjadi satu, dan sekarang mempunyai ruangan masing-masing. Dokter spesialis juga sudah satu ruangan tersendiri, bertujuan agar membuat para pasien menjadi nyaman, dan juga dokternya tidak bergantian, jika kemarin bergantian karena keterbatasan tempat dan kursi gigi,” tutupnya. (Dwi/adv)

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbaikpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

Poliklinik Konservasi Gigi, Spesialis Perawatan Saluran Akar hingga Estetika

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memiliki poli konservasi gigi yang telah ada sejak tahun 2022 lalu. Konservasi gigi ini untuk perawatan saluran akar dan penambalan dengan sinar (restorasi komposit).

Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, drg Safitri Kusuma Dewi, Sp.KG menjelaskan, poliklinik konservasi gigi seperti melakukan perawatan gigi hingga dapat melakukan perawatan saluran akar (saraf pada gigi) dan estetika pada gigi.

drg Safitri mengatakan, bahwa ia lebih mengutamakan perawatan gigi ketimbang mencabut gigi, sehingga selalu berusaha memperbaiki gigi pasien.

“Konservasi gigi spesialisasi yang lebih ke arah mempertahankan ya, selama dan sebisa mungkin gigi di dalam rongga mulut dan estetikanya gigi,” katanya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, pelayanan konservasi gigi telah dilakukan sejak Oktober 2022. Setiap harinya, drg Safitri bisa menerima pasien gigi sebanyak 12 orang. Ia sendiri telah menyelesaikan studi konservasi gigi sejak Juli 2022.

“Kami telah ada sejak 2022 lalu. Dalam pelayanan kami bisa melayani hingga 12 pasien setiap hari kerja pelayanan,” katanya.

Untuk proses pelayanannya sendiri, ia mengatakan sesuai dengan jadwal pelayanan dengan melakukan observasi pada pasien gigi dan menjadwalkan kontrol pasien.

“Biasanya pasien baru datang dilakukan pemeriksaan awal, radiologi, dan konsultasi. Kemudian dijadwalkan kembali harus kontrol tanggal berapa. Biasanya pasien diminta kontrol dalam waktu seminggu sekali sesuai jadwal,” jelasnya.

Safitri menambahkan, keunggulan dari konservasi gigi RSUD Taman Husada Kota Bontang yakni, saat ini telah ditanggung pelayanan oleh BPJS Kesehatan dan juga terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

“Kelebihan pelayanan konservasi gigi di RSUD tertanggung BPJS, dan

bisa langsung terintegrasi dengan pelayanan lainnya seperti bedah mulut atau dokter gigi anak. Hingga saat ini juga yang sering dialami yakni kendala SDM konservasi gigi yang masih belum banyak,” ungkapnya.

Ia mengharapkan ke depannya, RSUD dan Pemkot Bontang lebih memfasilitasi alat konservasi agar jangkauan pelayanan yang dilakukan bisa lebih banyak. (adv/yah)



Ruangan poliklinik konservasi gigi RSUD Bontang.



DWI S

Salah satu ruangan rawat inap di RSUD Taman Husada Bontang.

Ruang Rawat Inap Sudah Penuhi Standar

BONTANG - Ruang rawat inap yang terdapat di RSUD Taman Husada sudah memenuhi nilai standar. Ada beberapa di antaranya, seperti ruang rawat inap intensif, ruang perawatan anak di bawah 18 tahun, serta ruang sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Hal ini dijelaskan Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.

Dikatakannya, ada beberapa ruangan rawat inap yang terdapat di RSUD Bontang, dari ruangan sesuai kelas, Very Important Person (VIP), bahkan ruangan intensif.

Ruangan rawat inap intensif terdiri dari ICU, ICCU, PICU, NICU, serta ruang isolasi. Untuk ruang perawatan biasa meliputi ruang anak usia di bawah 18 tahun, yakni ruang cempaka.

Ruangan perawatan kelas 1 dan ruangan perawatan VIP ada di bagian Seruni. Ruang perawatan kelas 3 dan 2 ada di Bougenvil dan Edelweis, serta ruang perawatan Flamboyan untuk ibu bersalin dan kebidanan kandungan.

Untuk fasilitas ruang rawat inap sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan (PMK), sarana dan prasarana ruangan terbaru sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), bahwa untuk kelas 3 maksi-

mal ada 6 bed, kelas 2 maksimal 4 bed, serta kelas 1 maksimal 2 bed.

"Kami sudah sesuai dengan kelas masing-masing, dari kelas 3, 2, dan 1," ungkapnya, Senin (16/10/2023).

Kemudian, di setiap ruangan ada ketentuannya, seperti bed elektrik yang dimana pada ruangan insentif bed tersebut harus bisa diputar, serta naik turun. Ada tiga sisi pada bagian kepala, bagian punggung, serta pada bagian kaki. Bed yang wajib berada di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Selain itu, ada juga nakas yang disediakan guna penyimpanan barang, pada lemari kecil untuk para pasien. Outlet oksigen yang tersedia, dan sarana lain seperti AC, dan televisi. Dilengkapi juga dengan saluran telepon di ruang perawatan, untuk mempermudah perawat menghubungi dokter atau yang lainnya.

"Sejauh ini untuk ruang rawat inap sudah sesuai dengan standar kelas B, minimal 200 tempat tidur. Saat ini kami sudah sesuai dengan 200 tempat tidur. Akan tetapi, di kategori yang lain masih ada yang kurang, kalau di PMK yang terbaru ini, bahwa standar yang untuk isolasi 10 persen, kami harus menyiapkan 20 tempat tidur, dan saat ini kami masih kekurangan di situ. Terkait sarana dan prasarana tentu dengan anggaran yang sangat besar," paparnya.

Ratna juga menjelaskan, untuk ruangan perawatan kelas 3 sudah mencapai angka 62 persen, dimana RSUD Bontang sudah memenuhi standar. Dengan standar yang ditetapkan adalah minimal 30 persen dari total tempat tidur, kalau tempat tidur 200 minimal harus memiliki 50 tempat tidur di kelas 3.

Saat ini RSUD sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

"Untuk kelas 3 sebenarnya kami sudah memenuhi standar, akan tetapi kelas 3 ini sering sekali penuh. Masih sangat kurang dan banyak pasien yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan kelasnya. Tetapi tidak menjadi kendala buat kami, selagi masih ada ruangan yang kosong dan bisa digunakan, akan kami titipkan pasien di ruangan tersebut," bebernya.

Dengan harapan kedepan, bisa mengikuti kelas rawat standar sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) 12 indikator tersebut.

Saat ini RSUD belum bisa memenuhi semuanya, dengan sarana dan prasarana yang baru. Bahkan jika mungkin dengan adanya tambahan gedung baru, dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah bisa mensupport untuk sarana dan prasarana di RSUD Bontang. (dwi/adv)



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@ibishotelsamarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Peringatan Maulid Nabi Gelaran HIKMA Kutim, Kasmidi: Momentum Perkuat Silaturahmi

SANGATTA - Himpunan Keluarga Massenrempulu (HIKMA) Kutai Timur (Kutim) menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilangsungkan di Teras Belas Cafe and Resto Sangatta, Senin (16/10/2023). Maulid Nabi kali ini diisi dengan tausiah yang dibawakan penceramah Ustad Ruslan Lambari. Turut hadir DPW HIKMA Kaltim Balfas Syam, perwakilan FKPD, perwakilan paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh HIKMA dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Wabup Kasmidi Bulang mengucapkan syukur, pasalnya momentum maulid ini semua warga HIKMA bisa saling bersilaturahmi kembali. Tak lupa ia mengapresiasi seluruh warga Sulawesi, di antaranya pilar-pilar KKSS dan keluarga HIKMA.

"Terima kasih berkat dukungannya bisa menjaga keutuhan Kabupaten Kutim. Sehingga terwujud kabupaten yang sejuk, aman dan tenteram. Warganya pun kini saling menjaga, menghormati dan saling memberikan masukan," ucap Kasmidi yang juga menjabat Ketua DPC HIKMA Kutim.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Bertujuan untuk mengingatkan akan pentingnya meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW.

"Mari kita rajin silaturahmi demi Kutim yang kita banggakan," tutur Kasmidi.

Sementara itu, penceramah Ustad Ruslan Lambari mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

sangat penting dilakukan. Bahkan ia mengajak seluruh umat muslim, agar bisa mengetahui sejarah-sejarah nabi.

"Yang terpenting perkenalkan sejak dini sejarah nabi dan kebiasaan nabi terhadap anak-anak, baik cara berpakaian, saat makan, minum dan lain sebagainya. Serta contohkan sifat pemalu nabi, sehingga bisa mencegah hal-hal yang negatif," terangnya.

Dia juga mengajak kepada seluruh masyarakat, agar kerap melakukan salawat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan terus bersalawat, maka akan memperpanjang rezeki, mempermudah urusan.

"Untuk menghindari dari masalah atau mempermudah urusan maka diawalilah dengan salawat, insyaallah urusan kita akan dipermudah," singkatnya. (Rkt)



Kapolda Mahulu AKBP Anthony Rybok saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023.

Operasi Mantap Brata 2023-2024: Polres Mahulu Siap Amankan Pemilu 2024

MAHAKAM ULU - Polres Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar apel pasukan dalam Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024, untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Dalam amanatnya, Kapolda Mahulu, AKBP Anthony Rybok, mengatakan bahwa Pemilu 2024 adalah momen penting bagi Indonesia sebagai bukti kematangan demokrasi dan penentu masa depan bangsa.

"Operasi Mantap Brata 2023/2024, yang berlangsung selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, melibatkan 261.695

personel di seluruh Indonesia. Polri bersama TNI, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra kamtibmas lainnya akan menjaga keamanan seluruh tahapan pemilu," ungkap Anthony saat menyampaikan amanatnya di hadapan peserta apel di Juoh Bilang, Selasa (17/10).

Kapolda Mahulu menambahkan, Operasi ini juga didukung oleh operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, dengan fokus membangun persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok.

"Command Center yang terintegrasi akan memastikan koordinasi dan informasi terorganisir dengan baik

dari pusat hingga daerah. Selain itu, strategi komunikasi publik diperkuat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," tandasnya.

Kegiatan ini dilakukan di halaman Mako Polres Mahakam Ulu, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, sekitar pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah, yang dihadiri oleh Waka Polres Mahulu, Kompol Made Pasek Riawan, para PJU, Polsek Long Bagun, Koramil Long Bagun, BPBD, Polisi Pamong Peraja, LSM, serta perwakilan masyarakat.

Pewartu: Ichal

Redaktur: Agus Susanto





Kejati Kaltim, bersama Plh. Kadisdikbud Kaltim, berfoto bersama salah satu perwakilan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim 2023.

Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim 2023, Agen Perubahan dari Generasi Milenial

BALIKPAPAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim menggelar pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Provinsi Kaltim tahun 2023 di Kota Balikpapan mulai 17-20 Oktober 2023.

Kegiatan dibuka Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Hari Setiyono, didampingi Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Robiana Hastawulan.

Kepala Kejati Kaltim, Hari Setiyono, mengatakan bahwa kegiatan ini akan menjadi contoh nasional dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar.

"Duta pelajar sadar hukum di provinsi Kaltim ini merupakan pionir yang sudah keempat kalinya kami selenggarakan. Harapan kami, ini bisa menjadi contoh nasional bagi seluruh Indonesia dalam mengantisipasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar," ujarnya pada Kamis (17/10/2023).

Hari menjelaskan bahwa pemilihan duta pelajar sadar hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada generasi milenial, khususnya pelajar. Hal ini penting karena angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar di Indonesia masih tergolong tinggi.

"Di daerah lain, kita sering mendengar pelajar yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Namun, di Kaltim, kita belum pernah mendengar hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelajar di Kaltim memiliki tingkat pemahaman hukum yang baik," jelasnya.

Para duta pelajar sadar hukum yang terpilih akan mendapatkan pelatihan khusus tentang hukum. Mereka juga akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

"Kami berharap, para duta pelajar sadar hukum ini dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Mereka dapat membagikan penge-

tahuan hukum kepada teman-teman mereka," tambah Hari.

Sementara itu, Robiana Hastawulan, mengaku bahwa kegiatan ini sangat berdampak positif bagi para pelajar. Pasalnya, hukum harus dikenalkan sejak dini kepada para pelajar.

"Yang perlu ditekankan adalah bahwa ketika mereka memperoleh pemahaman tentang hukum, secara otomatis mereka akan memperkuat keamanan dalam diri dan lingkungannya. Selain itu, mereka dapat mengedukasi teman-teman mereka," ucapnya.

Seperti yang diketahui, sebanyak 10 Kabupaten/Kota di Kaltim mengirimkan perwakilan dari pelajar SAM/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) untuk mengikuti pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim 2023. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Baru, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang